TIGA PRASARAN PEMBANGUNAN

oleh :
PRESIDEN SOEKARNO
DR MOH HATTA
P. M. DJUANDA

SEKRETARIAT
MUSJAWARAH NASIONAL PEMBANGUNAN
DJAKARTA

PERPUSTAKAAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

TIGA PRASARAN PEMBANGUNAN

oleh:
PRESIDEN SOEKARNO
DR MOH. HATTA
P. M. DJUANDA

SEKRETARIAT
MUSJAWARAH NASIONAL PEMBANGUNAN
DJAKARTA

PERPUSTAKAAN NASIONAL

PERPUSTAKAAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

TIGA PRASARAN PEMBANGUNAN

oleh:
PRESIDEN SOEKARNO
DR MOH. HATTA
P. M. DJUANDA

SEKRETARIAT
MUSJAWARAH NASIONAL PEMBANGUNAN
DJAKARTA

PERPUSTAKAAN NASIONAL

TJATATAN

Ketiga prasaran ini jang kami namakan:

TIGA PRASARAN PEMBANGUNAN

oleh:

1. *Presiden Soekarno*
2. *Dr Moh. Hatta*
3. *P. M. Djuanda*

telah disampaikan dalam sidang hari pembukaan Musjawarah Nasional Pembangunan di Gedung Olahraga di Djakarta pada tanggal 25 Nop. 1957.

Sekretariat
Musjawarah Nasional Pembangunan

PERPUSTAKAAN NASIONAL

PRASARAN
PRESIDEN SOEKARNO.

Saudara-saudara sekalian!

Hari ini dengan resmi akan dibuka Musjawarah Nasional Pembangunan, satu Musjawarah jang amat penting sekali, satu Musjawarah jang akan dapat menentukan apakah tjita-tjita kita jang telah terkandung didalam kalbunja bangsa Indonesia pada detik proklamasi 17 Agustus 1945 dapat direalisasikan atau tidak.

Djikalau saja melihat pada hadirin dan hadirat didalam Musjawarah Nasoinal Pembangunan ini, maka saja mempunjai perasaan, menindjau bukan sadja kehari-depan, tapi djuga kehari-hari dan tahun-tahun, berpuluh-puluh djumlahnja jang ada dibelakang kita. Saja memandang didalam wadjah penderitaan perdjuangan, korbanan bangsa Indonesia berpuluh-puluh tahun lamanja. Penderitaan perdjuangan dan korbanan jang telah mendjadi penggerak kita bangsa Indonesia untuk achirnja mengambil nasib didalam tangan kita sendiri dengan mengadakan proklamasi 17 Agustus 1945.

Saja melihat didalam wadjah beberapa Saudara-saudara tua jang hadir disini, pemimpin-pemimpin daripada pergerakan kita berpuluh-puluh tahun jang lalu, jang bukan sadja memimpin pergerakan nasional itu, tapi djuga telah menderita dan berkorban. Banjak diantara Saudara-saudara jang hadir disini adalah orang-orang muda, orang-orang dari djaman sekarang, tapi banjak djuga jang hadir disini adalah orang-orang jang bukan sadja mengalami perdjuangan kita jang telah berpuluh-puluh tahun itu, bahwan memberi pimpinan kepada perdjuangan kita jang telah berpuluh-puluh tahun itu, serta dengan sehebat-hebatnja ikut menderita dan berkorban untuk satu tjita-tjita jang tinggi.

Maka djikalau kita pada hari ini berkumpul bersama-sama didalam satu Musjawarah jang sangat penting, Musjawarah Nasional Pembangunan ini, baiklah kita semuanja menginsjafi bahwa sebenarnja kita ini semuanja, baik jang muda maupun jang tua, memikul amanat,

PERPUSTAKAAN NASIONAL

amanat daripada segenap rakjat Indonesia, amanat daripada penderitaan segenap rakjat Indonesia jang telah berpuluh-puluh tahun lamanja, amanat daripada korbanan-korbanan jang telah diberikan rakjat Indonesia berpuluh-puluh tahun lamanja, amanat jang membuat rakjat Indonesia ini dengan ichlas memberikan korbanan-korbanan jang berupa hukuman-hukuman didalam pendjara, amanat jang telah digerakkan oleh rakjat Indonesia untuk mengirimkan pemimpin-pemimpinnja beratus-ratus, bahkan beribu-ribu orang, berpuluh-puluh tahun lamanja didalam alam pembuangannja baik di Boven Digul maupun di Bangka, maupun dipulau Sumba maupun ditempat-tempat jang lainnja.

Maka oleh karena itu saja minta kepada Saudara-saudara sekalian agar supaja kita pada saat mengadakan Musjawarah Nasional Pembangunan tidak melupakan akan hal-hal ini.

Tadi saja katakan bahwa segenap perdjuangan kita jang berpuluh-puluh tahun, penderitaan kita jang berpuluh-puluh tahun, korbanan-korbanan kita jang berpuluh-puluh tahun itu achirnja mentjetuskan proklamasi kita pada tanggal 17 Agustus 1945.

Maka dari itu baiklah kita renungkan dan kita maklumi apa jang tersirat didalam proklamasi 17 Agustus 1945 itu. Naskah proklamasi itu adalah satu naskah jang terdiri daripada beberapa kalimat, tetapi naskah itu adalah hasil konvergensi daripada penderitaan kita berpuluh-puluh tahun. Naskah itu adalah suara daripada aliran sungai, sungai besar dan sungai ketjil sedjak berpuluh-puluh tahun dengan melalui segala rintangan-rintangan dan penderitaan-penderitaan. Didalam naskah itu termasuk penderitaan-penderitaan misalnja Saudara-saudara kita jang mendirikan suatu gerakan Serikat Islam. Didalam naskah itu termasuk penderitaan-penderitaan daripada gerakan Partai Nasional. Didalam naskah itu termasuk penderitaan daripada Serikat Islam dan Sarikat Rakjat. Didalam naskah itu termasuk gerakan nasional. Didalam naskah itu termasuk penderitaan gerakan Pendidikan Nasional. Didalam naskah itu termasuk P.B.I. Didalam naskah itu termasuk gerakan daripada P.S.I.I. Didalam naskah itu termasuk penderitaan dari gerakan P.P.P.K.I. Didalam naskah itu termasuk penderitaan dari segenap rakjat Indonesia jang berpuluh-puluh tahun lamanja.

PERPUSTAKAAN NASIONAL

Saja minta kepada Saudara-saudara sekalian supaja tidak melupakan akan hal itu. Manusia mempunjai tendensi untuk melupakan hal jang lalu, tetapi kita jang berkumpul didalam Musjawarah Nasional Pembangunan sekarang ini, djangan melupakan penderitaan-penderitaan kita itu.

Saja tadi sebutkan bahwa didalam beberapa kalimat daripada naskah proklamasi itu tersiratlah hal-hal jang telah mendjadi tjita-tjita daripada bangsa Indonesia berpuluh-puluh tahun, dan apa jang ditjita-tjitakan oleh bangsa kita berpuluh-puluh tahun itu, ialah satu Negara Kesatuan Republik Indonesia jang berwilajah kekuasaan dari Sabang sampai ke Merauke.

Dibidang sosial ekonomi, maka kita harus mentjiptakan satu masjarakat jang adil dan makmur. Satu masjarakat jang berdasarkan kepada keadilan sosial, satu masjarakat jang pada garis besarnja tertulis didalam pasal 38 daripada U.U.D. kita sekarang.

Maka djikalau kita menghadapi persoalan pembangunan, terutama sekali saja adjak Saudara-saudara sekalian untuk tidak melupakan apa jang tersirat didalam proklamasi 17 Agustus 1945 mengenai tjita-tjita sosialisme jaitu masjarakat jang adil dan makmur, masjarakat jang berdasarkan keadilan sosial, masjarakat jang pada garis besarnja tersirat didalam pasal 38 daripada U.U.D. kita sekarang. Sampai sekarang Saudara-saudara apa jang tertulis didalam pasal 38 daripada U.U.D. kita itu belum terealisasi. Maka oleh karena itu pakailah apa jang tertulis didalam U.U.D. kita pasal 38 untuk mendjadikan bintang pimpinan lightstar, Saudara-saudara, mendjadi dasar daripada menghadapi persoalan pembangunan. Djikalau kita melupakan hal itu maka sebenarnjalah kita telah menjimpang daripada apa jang tersirat didalam proklamasi 17 Agustus 1945, bahkan kita lupa kepada penderitaan-penderitaan korbanan-korbanan, perdjuangan-perdjuangan daripada segenap rakjat Indonesia berpuluh-puluh tahun. Djikalau kita ingin setia kepada jang dimaksudkan oleh bangsa Indonesia dan dikerdjakan oleh bangsa Indonesia didalam segenap perdjuangan jang membawa korbanan jang pahit dan getir itu, maka setialah kita kepada apa jang tersirat didalam proklamasi 17 Agustus 1945.

Saudara-saudara, maka saja menghendaki agar supaja Munap ini mengambil itulah sebagai pegangan.

PERPUSTAKAAN NASIONAL

Didalam surat undangan dituliskan beberapa usul atjara, 13 buah djumlahnja. Tetapi saja bergembira bahwa apa jang dituliskan 13 buah itu sekedar usul-usul. Sebaliknja saja bergembira sekali pula, bahwa didalam surat undangan itu dituliskan sebagai ketentuan, dus bukan sebagai usul-sul:

„M a k s u d :

1. Melaksanakan keputusan Munas jang lalu dalam lapangan pembangunan;
2. Mempersiapkan dasar-dasar untuk rentjana Pembangunan Nasional jang meliputi segala segi kehidupan dan penghidupan bangsa menudju masjarakat jang adil, makmur dan sedjahtera sesuai dengan kepribadian rakjat Indonesia;
3. Mengadakan persiapan-persiapan untuk mendjamin penjalaran rentjana tersebut kearah pelaksanaannja dan ikut-sertanja rakjat dalam perentjanaan dan pelaksanaan pembangunan".

Saja bergembira bahwa ini ditjantumkan sebagai ketentuan-ketentuan, sebab dengan adanja ketentuan-ketentuan ini Munap akan dapat menundjukkan kesetiaannja bukan sadja kepada Naskah Proklamasi 17 Agustus 1945 tetapi djuga kepada segenap perdjuangan, segenap penderitaan, segenap pengorbanan jang telah diberikan oleh bangsa Indonesia berpuluh-puluh tahun.

Saudara-saudara apa sebab saja teristimewa sekali bergembira bahwa sebagai ketentuan dituliskan terutama sekali ad 2. Menjiapkan dasar-dasar untuk perentjanaan Pembangunan Nasional jang meliputi segala segi kehidupan dan penghidupan bangsa menudju masjarakat jang adil, makmur dan sedjahtera sesuai dengan kepribadian rakjat Indonesia, ialah oleh karena saja mempunjai pendapat bahwa selama ini bukan sadja kita sebagai tadi saja katakan tidak dengan tegas menudju kepada realisasi daripada satu masjarakat jang adil, makmur dan sedjahtera, masjarakat jang berkeadilan sosial sebagai jang tertulis didalam Pantja-sila, masjarakat jang tergambar garis besarnja didalam pasal 38 daripada U.U.D.S. kita jang berbunji:

1. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.

PERPUSTAKAAN NASIONAL

2. Tjabang-tjabang produksi jang penting bagi Negara dan jang menguasai hadjat hidup orang banjak dikuasai oleh Negara,
3. Bumi, air dan kekajaan alam jang terkandung didalamnja dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakjat".

Bukan sadja kita belum dengan tegas didalam 12 tahun ini menudju kepada realisasi dari masjarakat jang demikian itu, saja ulangi, masjarakat jang adil dan makmur, adil dan sedjahtera, masjarakat jang berkeadilan sosial, masjarakat jang garis besarnja tertulis dalam pasal 38 U.U.D., tapipun kita belum mempunjai rentjana daripada masjarakat jang demikian itu.

Sebenarnja apa jang tertulis didalam pasal 38 U.U.D. hanjalah sekedar satu garis besar sadja, sebagai garis besar daripada tjita-tjita. Apalagi kita memakai perkataan: sedjahtera, adil-makmur, keadilan sosial, maka itu sekedar mengenai tjita-tjita jang didalam pidato-pidato saja didalam waktu-waktu jang achir ini, saja katakan sebagai hal jang remeng-remeng terbentang dimuka chajal, angan-angan kita. Sebagai satu hal jang mendjadi api pembakar kita untuk berkorban, untuk menderita, untuk berdjuang, untuk memeras kita punja tenaga, untuk achirnja kita berani mengadakan proklamasi 17 Agustus 1945. Sekedar tjita-tjita, angan-angan jang kataku tadi remeng-remeng, samar-samar, tapi tjukup untuk membakar hati kita untuk berkorban dan menderita.

Tetapi kalau ditanja kepada kita sekalian dengan djelas dan tegas, sudahkah kita mengetahui dengan sampai kedetail-kedetailnja, bagaimana rupa dan udjudnja masjarakat jang berkeadilan sosial itu, masjarakat Indonesia jang adil dan makmur itu, masjarakat Indonesia jang berdasarkan 3 pokok jang ditulis didalam pasal 38 U.U.D. kita itu, kita belum bisa memberikan djawaban jang tegas.

Maka oleh karena itu Saudara-saudara, gembiralah saja bahkan saja mengandjurkan kepada Musjawarah Nasional Pembangunan ini, agar supaja kita menudju kepada terdjadinja satu rentjana, rentjana daripada masjarakat jang demikian.

Didalam pidato-pidato saja diwaktu jang achir-achir ini, saja mengambil sebagai misal orang jang mentjita-tjitakan satu gedung, mentjita-tjitakan satu gedung untuk dirinja sendiri, menganganken me-

PERPUSTAKAAN NASIONAL

miliki satu gedung untuk mendjadi tempat kediamannja agar ia bisa hidup aman, bahagia dan sedjahtera didalam gedung itu dan ia sudah mempunjai biaja untuk membuat, untuk memiliki gedung jang demikian itu, tetapi gedung itu masih sekedar keinginan, satu angan-angan satu tjita-tjita. Maka apa jang harus dia perbuat?

Sudah kita ketahui sampai kepada detail-detailnja, bagaimana rupa dan udjudnja masjarakat jang berkeadilan sosial itu; masjarakat Indonesia jang adil dan makmur itu; masjarakat Indonesia jang berdasarkan 3 pokok jang tertulis didalam pasal 38 daripada Undang-undang Dasar kita itu. Kita belum bisa memberikan djawaban jang tegas. Maka oleh karena itu Saudara-saudara, bergembiralah saja bahwa saja mengandjurkan kepada Musjawarah Nasional Pembangunan agar supaja kita menudju kepada terdjadinja satu rentjana daripada masjarakat jang demikian.

Didalam pidato-pidato saja diwaktu-waktu jang achir saja mengambil bagian, saja katakan didalam pidato-pidato itu, orang jang mentjita-tjitakan gedung itu harus memanggil seorang arsitek, dan arsitek itu mendapat opdracht dari dia untuk membuat satu blauwdruk, satu blue print, satu rentjana daripada gedung jang ia tjita-tjitakan.

Opdracht jang tegas, buatkanlah bagiku suatu rentjana, satu blauwdruk, satu blue print dari gedung jang saja tjita-tjitakan itu. Satu arsitek membuat blue print, kemudian djikalau sudah selesai maka blauwdruk atau blue print itu harus direalisasikan, diselenggarakan dan dilaksanakan.

Nah, Saudara-saudara dengan mengambil tamsil ini, saja minta agar supaja bangsa Indonesia umumnja, chususnja Saudara-saudara bekerdja. Kita tegas mempunjai tjita-tjita, djelas kita mempunjai angan-angan masjarakat jang adil dan makmur, suatu masjarakat jang berkeadilan sosial.

Tetapi sebagaimana dikatakan, belum pernah kita mengetahui dengan djelas sampai kepada detail-detailnja, bagaimana masjarakat jang demikian itu. Dan kita tidak boleh menjimpang daripada tjita-tjita itu. Sebab siapa jang menjimpang dari tjita-tjita ini, dia tidak setia kepada proklamasi 17 Agustus 1945; siapa jang menjimpang dari tjita-tjita daripada Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan

PERPUSTAKAAN NASIONAL

masjarakat jang adil dan makmur, dia tidak setia apa jang tersirat didalam proklamasi 17 Agustus 1945. Siapa jang menjimpang daripada tjita-tjita politik dan tjita-tjita idiil daripada Negara Kesatuan Republik Indonesia, dia tidak setia kepada segenap perdjuangan rakjat Indonesia jang 82 djuta; tidak setia kepada rakjat jang telah membawa penderitaan dan korban; jang membuat puluhan ribu pemimpin-pemimpin menderita, jang membuat puluhan ribu pemuda-pemuda kita gugur didalam medan peperangan, jang membuat puluhan ribu pemimpin-pemimpin kita meringkuk didalam pendjara atau pembuangan berpuluh-puluh tahun menderita.

Kita harus setia Saudara-saudara kepada penderitaan-penderitaan itu. Maka oleh karena itu opdracht kepada arsitek hal membuat gedung harus tegas. Buatlah bagiku gedung sebagaimana kukatakan dalam blue print buatlah gedung jang demikian.

Arsitek ini ialah satu Dewan Perantjang Nasional, Dewan Perantjang Nasional jang terdiri daripada ahli-ahli, baik ahli-ahli dari Pusat dan dari Daerah. Dewan Perantjang Nasional jang dengan kennis van zaken, dengan pengetahuan jang tepat membuat blauwdruk daripada apa jang kita tjita-tjitakan.

Djikalau kita tidak mempunjai blue print jang demikian itu, Saudara-saudara tidak mungkin kita bisa merealisasikan masjarakat jang kita tjita-tjitakan; dan djikalau kita tidak merealisasikan masjarakat jang kita tjita-tjitakan, maka seluruh rakjat kita, bahkan rakjat jang telah memberikan penderitaan jang demikian beratnja itu tetap akan menuntutnja. Tetap rakjat akan menanja kepada kita, mana realisasi daripada masjarakat jang kita tjita-tjitakan.

Nah, Saudara-saudara saja tadi berkata dengan sangat bergembira, bahwa didalam ketentuan-ketentuan daripada Munas Pembangunan ini dituliskan mempersiapkan dasar-dasar untuk Rentjana Pembangunan Nasional jang meliputi segala segi kehidupan dan penghidupan bangsa menudju masjarakat jang adil, makmur dan sentausa, sesuai dengan kepribadian rakjat Indonesia, dan mengadakan persiapan-persiapan untuk mendjamin penjaluran rentjana tersebut kearah pelaksanaannja dan ikut-sertanja rakjat dalam perentjanaan dan pelaksanaan pembangunan.

PERPUSTAKAAN NASIONAL

Dan saja minta kepada Saudara-saudara berpegang pada ketentuan ini. Dan ketentuan ini menurut anggapan saja menudju kepada terbangunnja, disalurkannja oleh Saudara-saudara akan pembangunan satu Dewan Perantjang Nasional jang harus membuat blauwdruk dari masjarakat jang adil dan makmur.

Kemudian nanti djikalau blauwdruk sudah djadi, sudah barang tentu blauwdruk ini disjahkan oleh wakil-wakil bangsa kita didalam Parlemen dan blauwdruk ini harus dilaksanakan oleh kita semuanja didalam satu penjelenggaraan jang mengingat ketentuan No. 3, mendjamin penjaluran rentjana tersebut kearah pelaksanaan dan ikutsertanja rakjat dalam rentjana pembangunan itu.

Saudara-saudara, djikalau kita berkumpul disini didalam Gedung Olah Raga ini berdampingan satu sama lain, maka kita sebagai saja katakan tadi adalah ini merupakan satu sidang jang amat penting, segenap rakjat melihat kepada kita, perhatian rakjat ditudjukan kepada kita.

Terlebih dahulu saja katakan djikalau Munap ini tidak tertudju pada satu arah jang tertentu, kepada perentjanaan dan realisasi apa jang ditjita-tjitakan rakjat itu, maka Munap itu akan memberikan keketjewaan jang besar bagi rakjat.

Saja kira ini adalah harapan segenap rakjat, apalagi kalau saja melihat jang duduk dihadapan saja ini pemimpin-pemimpin tua kita, lebih muda dari Saudara-saudara jang duduk disana, pemimpin-pemimpin tua kita jang telah dengan rakjat berkorban dan menderita untuk tjita-tjita sosial itu.

Maka saja boleh tegaskan, bahwa segenap rakjat akan bergembira kalau melihat bahwa Munap dengan menudju pada jang ditjita-tjitanja dan akan ketjewa djikalau Munap tidak menudju pada realisasi dari apa jang mereka tjita-tjitakan.

Selandjutnja Saudara-saudara saja mendoakan pada Tuhan agar supaja Tuhan memberikan pimpinan pada Munap.

Sekian.

PERPUSTAKAAN NASIONAL

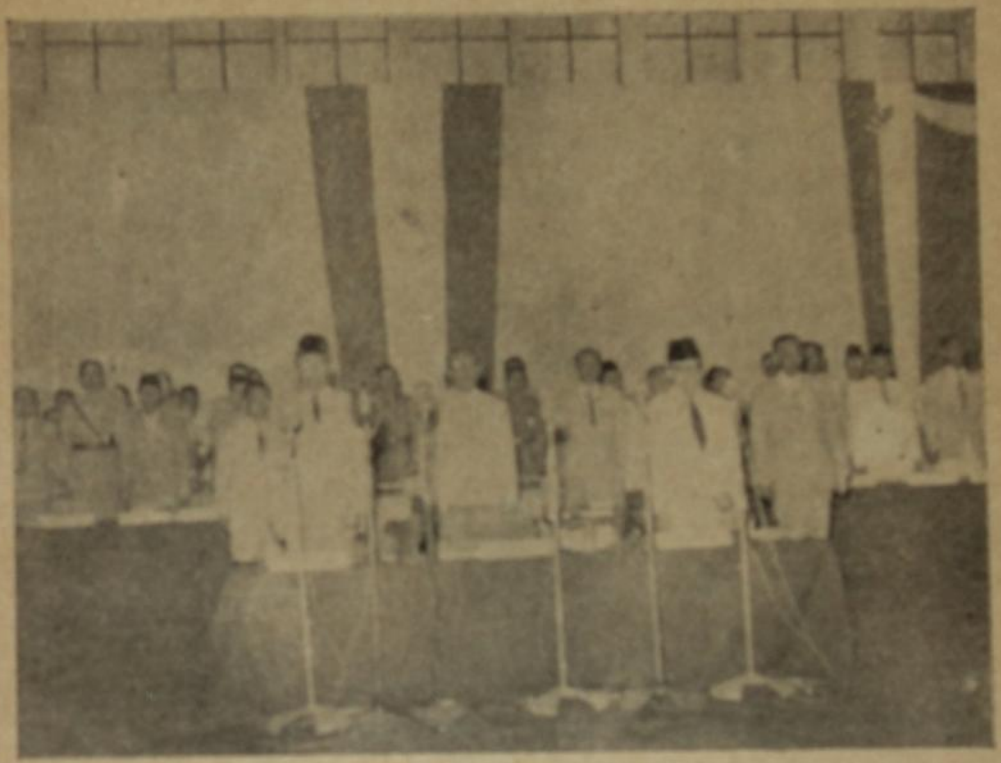

Dari kiri kekanan Presiden Soekarno, P.M. Djuanda dan Dr Moh. Hatta ketika upatjara lagu kebangsaan „Indonesia Raya" pada pembukaan Munas Pembangunan tanggal 25 Nopember 1957.

PERPUSTAKAAN NASIONAL

PERPUSTAKAAN NASIONAL

PRASARAN
Dr MOH. HATTA

Kita Membangun.

Saudara-saudara, hadirin jang terhormat,

Kita semuanja hadir dalam sidang ini untuk melaksanakan Musjawarah Nasional Pembangunan.

Musjawarah ini nasional sifatnja, karena meliputi seluruh Tanah Air kita. Disini hadir untuk bermusjawarah wakil-wakil dari seluruh daerah.

Selain dari nasional sifatnja, musjawarah ini istimewa mengenai pembangunan. Pembangunan nasional, pembangunan negara dan masjarakat, jang mendjadi pokok soalnja. Sebab itu hadir pula disini berbagai golongan jang disebut golongan fungsionil. Barangkali lebih tepat kalau susunan katanja diputar sedikit dan disebut „Musjawarah Pembangunan Nasional".

Dalam surat undangan disebut, bahwa maksud musjawarah ini ialah:

1. Melaksanakan keputusan Musjawarah Nasional dalam lapangan pembangunan.
2. Mempersiapkan dasar-dasar untuk Rentjana Pembangunan Nasional, jang meliputi segala segi kehidupan dan penghidupan Bangsa menudju masjarakat jang adil, makmur dan sentausa, sesuai dengan kepribadian rakjat Indonesia.
3. Mengadakan persiapan-persiapan untuk mendjamin penjaluran Rentjana tersebut kearah pelaksanaannja dan ikut-sertanja rakjat dalam perentjanaannja dan pelaksanaan pembangunan.

Pandangan sepintas lalu kedalam atjara jang diusulkan oleh Pemerintah tjukup memberi kejakinan, bahwa seluruh usaha jang harus dilaksanakan Pemerintah untuk membangun negara dan masjarakat dapat dipersoalkan disini. Tetapi njatalah, bahwa pembitjaraan jang mendalam tentang segala hal itu tidak dapat dilaksanakan disini. Itu menghendaki waktu berbulan-bulan. Tugas sematjam itu adalah tugas

PERPUSTAKAAN NASIONAL

Dewan Perwakilan Rakjat, dan pembitjaraan tentang itu tidak akan habis-habisnja. Tiap-tiap pasal itu akan mengalami perkembangan masalahnja tiap-tiap tahun.

Kita disini dapat membatasi tugas kita dengan membitjarakan pokok-pokok masalah, jang mengenai pembangunan nasional. Daftar usaha pembangunan jang sedang dikerdjakan dalam waktu lima tahun ini dapat kita ketahui dari buku Rentjana Pembangunan Lima Tahun 1956—1960. Berapa banjak objek jang harus dibangun seterusnja, dapat diperoleh daftarnja pada Biro Perantjang Negara. Dan tiap-tiap propinsipun — kalau saja tak salah — mempunjai pula rentjana sendiri. Kalau diselidiki benar-benar, objek jang akan dibangun banjak sekali djumlahnja. Perhatian jang merata sadja telah menundjukkan, bahwa Indonesia kita ini memang kaja alamnja dan subur tanahnja. Tetapi, sebagaimana telah sering saja utjapkan, kekajaan jang terpendam itu, kalau tidak dikerdjakan tidak memberikan kemakmuran kepada rakjat kita. Maunja dikerdjakan, dengan sepenuh-penuh tenaga, supaja terlaksana tjita-tjita negara kita jaitu — seperti djuga tertjantum sebagai maksud musjawarah ini — mentjapai masjarakat jang adil, makmur dan sentausa.

Bruno Dietrich, seorang ahli geografi-ekonomi, pernah berkata: „Alam hanja memberi kesempatan untuk berekonomi, tetapi manusialah jang menimbulkan ekonomi itu". Alam kita telah memberikan kemungkinan untuk mentjapai kemakmuran dan kebahagiaan hidup jang sebesar-besarnja. Sekarang tinggal lagi usaha kita untuk mengerdjakannja.

Apabila kita berkumpul disini untuk bermusjawarah tentang pembangunan kita, maka mau tak mau terbajang dimuka saja tjaranja India membangun, seperti jang saja lihat dengan mata kepala sendiri waktu saja menindjau kesana dua tahun jang lalu, tjaranja Republik Rakjat Tiongkok membangun, jang baru sadja saja kundjungi. Kedua negara ini membangun menurut rentjana lima tahun. India tahun jang lalu telah meningkat kerentjana lima tahun kedua, jang titik-beratnja terletak pada membangun industri berat. R.R.T. sedang melaksanakan rentjana lima tahun pertama, jang akan selesai pada penghabisan tahun ini. Berlainan dari India jang bermula dengan meletakkan titik-berat pada sektor agraria termasuk irigasi, R.R.T. mulai dengan me-

PERPUSTAKAAN NASIONAL

letakkan titik berat pada pembangunan industri berat dan industri dasar.

Jang menarik perhatian pada kedua pembangunan itu ialah bahwa India maupun R.R.T. tidak sadja bekerdja dengan rentjana lima tahun, tetapi djuga melaksanakannja dalam praktik dengan tjara jang tepat. Segala daja-upaja dilakukan, supaja rentjana itu benar-benar dilaksanakan menurut waktunja. India bekerdja dengan mengisi penuh waktu 24 djam sehari semalam, dengan kerdja tiga giliran. R.R.T. bekerdja dengan radjin, hemat dan tjepat; tiap-tiap orang bekerdja 8 djam sehari.

Kedua-dua negara itu menghadapi dari semulanja kesulitan jang tidak sedikit. Kesulitan-kesulitan itu diatasinja dengan kemauan jang keras dan tekad jang kuat. Di India, rakjat seluruhnja, dikota dan didesa, diinsafkan lebih dulu dengan berbagai matjam penerangan, apa artinja plan 5 tahun bagi kemakmuran mereka dimasa datang. Rakjat dididik mendjadi "plan-mided". Seperti disebut didalam pengantar kata buku "The first Five Year Plan": „Berhasilnja rentjana ini bergantung pada hal, berapa djauhnja rakjat ikut-serta dan membantu pelaksanaannja".

Faktor jang menguntungkan bagi India dan R.R.T. ialah bahwa kedua-duanja dapat membangun diatas dasar keuangan negara jang telah stabil. India sudah sedjak semulanja mempunjai anggaran belandja jang setimbang. R.R.T. mengadakan dalam tahun 1954 stabilisasi nilai uang dengan tjara jang radikal, dengan mentjoret empat nol berturut-turut. Sepuluh ribu yuan lama didjadikan satu yuan baru. Selandjutnja rentjana lima tahun disusun diatas anggaran belandja jang setimbang.

Berlainan dari itu, rentjana 5 tahun Indonesia disusun diatas dasar keuangan negara jang labil, jang meluntjur kedjalan inflatoir. Segala perhitungan mendjadi sulit, dalam djangka pandjang mendjadi kabur. Sebab itu segala usaha harus dikerdjakan untuk mentjapai anggaran belandja jang setimbang dalam waktu jang singkat!

Apabila kita renungkan sebentar rentjana 5 tahun kita jang sedang berdjalan, maka njatalah bahwa rentjana itu diperbuat untuk melantjarkan pembangunan dalam masa lima tahun pertama, tetapi kita tidak dapat menangkap apa jang mendjadi dasar bimbingannja, guiding

PERPUSTAKAAN NASIONAL

principles. Itu tidak mengherankan, karena Pemerintah tidak memberikan petundjuk dasar jang tegas dan D.P.R. belum lagi mengesahkannja.

Dasar bimbingan itulah jang harus kita tjoba meletakkan didalam musjawarah ini.

Kita mau membangun! Tetapi apakah t u d j u a n p o k o k dari pada pembangunan itu? Sebagai patokan disebut didalam Mukaddimah Undang-undang Dasar kita, bahwa tugas kita ialah membangun Indonesia jang adil dan makmur. Tudjuan itu disebut djuga dalam surat undangan musjawarah pembangunan ini. Hanja ketegasan langkah kesana jang harus kita tjari dan kita tetapkan, sebagai dasar menjusun rentjana dan menentukan urutan prioriteitnja.

Menurut pendapat saja, kita harus bermula dengan meletakkan titik-berat pada pelaksanaan kepentingan hidup rakjat j a n g p r i m e r, jaitu makanan, pakaian, kesehatan dan perumahan. Sedjadjar dengan itu pelaksanaan pendidikan rakjat jang disesuaikan dengan keperluan pembangunan, kwantitatif dan kwalitatif. Pelaksanaan masing-masing kepentingan hidup jang primer ini merambat djuga kedaerah industri lainnja jang bersangkutan dengan pembangunan sektor ini.

Penambahan barang makanan setjara efektif, supaja kita dalam waktu jang singkat dapat mentjapai "self-supporting", tidak terbatas pada memperluas daerah persawahan dan ladang, tetapi mengenai djuga rentjana memperbuat djalan, pengairan, mendirikan pabrik rabuk dan mengatur distribusi sebaik-baiknja. Jang kemudian ini tidak sadja mengenai pendjualan beras jang tepat kepada rakjat, melainkan djuga soal pengangkutan didarat dan dilaut. Tugas pengangkutan ini harus ditetapkan dalam suatu rentjana jang memenuhi sjarat dan dasar ekonomi perhubungan, jaitu mengangkut dan memindahkan barang dari daerah produksi kedaerah konsumsi dengan ongkos jang semurah-murahnja dan dalam waktu jang sesingkat-singkatnja. Tidak dapat pula dilepaskan dalam perhubungan ini pembuatan pabrik karung, jang kapasitetnja barangkali lipat ganda dari keperluan mengangkut beras sadja. Djuga berbagai barang lainnja memerlukan karung, dalam berbagai djenis dan deradjat kekuatannja.

Sesuai dengan rentetan masalah ini, jang bermula dengan soal menambah bahan makanan an sich, harus diperbuat rentjana pem-

PERPUSTAKAAN NASIONAL

bangunan. Rentjana jang meliputi rentetan pekerdjaan jang komplementer.

Apabila kita memperbuat rentjana — ambillah rentjana lima tahun —, supaja pembangunan berdjalan setjara efektif berdasarkan prinsip „mentjapai hasil jang sebesar-besarnja dengan ongkos jang sekurang-kurangnja dan dalam waktu jang sesingkat-singkatnja, maka perlulah ada p i m p i n a n j a n g t e g a s, jang mendorong, mengkoordinasi dan mengadakan kontrole. Dengan tegas, dengan tidak ragu-ragu lagi, kita harus melaksanakan apa jang dikatakan „ekonomi terpimpin". Pemerintah harus banjak tjampur tangan dalam pelaksanaannja, dengan mengadakan petundjuk dan peratûran, tetapi bebas dari perbuatan birokrasi. Dalam pelaksanaan ekonomi, jang berpedoman kepada prinsip: m u r a h, b a i k, l a n t j a r dan t j e p a t, tidak ada jang lebih berbahaja dari pada birokrasi.

Sebab itu, pada pelaksanaan ekonomi terpimpin mestilah ada pembagian tanggung-djawab dan pimpinan. Tanggung-djawab jang tertinggi pada Pemerintah. Tetapi ada delegasi pimpinan dan tanggung-djawab kepada instansi jang tepat, jang dilaksanakan menurut dasar the right man in the right place: orang jang tepat pada tempat jang tepat. Pemerintah, dipusat atau daerah, melakukan kontrole, dengan mempergunakan orang jang tepat pula. Kalau orang jang tepat belum ada, djanganlah ditempatkan disitu sembarang orang sadja, oleh karena dia itu kawan kita, sahabat kita atau anak mas kita, tetapi tjarilah seorang jang berbakat kesitu dan latihlah dia dengan teori dan praktik sampai tjakap menunaikan tugasnja dengan rasa tanggung-djawab sepenuh-penuhnja. Pembangunan industri di India dan di R.R.T. dilakukan seperti itu, dan ternjata kebaikannja. Apa sebab kita tidak pula berbuat seperti itu? Sudah banjak „uang peladjaran" jang kita habiskan dengan menempuh djalan jang salah. Ketinggalan kita dalam pembangunan dari negara-negara tetangga jang sjarat-sjarat negerinja dan alamnja djauh kurang baik dari kita, mudah-mudahan membuka mata kita untuk bekerdja sebagaimana mestinja.

Setelah kita melajangkan pandangan kita kepada rentetan masalah pembangunan jang berpusat pada soal menambah hasil bumi untuk mentjukupkan makanan rakjat kita dengan produksi sendiri, maka terbajang pulalah pertalian pembangunan sektor ini dengan pemba-

PERPUSTAKAAN NASIONAL

ngunan industri barang-barang bangunan, seperti semen, batu bata, kapur, aspal, kaju dan lain-lain sebagainja. Saluran air, dam, djembatan, bangunan rumah dan lain-lainnja tidak mungkin dibuat, kalau tak ada bahan dasar pembangunan itu. Belum lagi barang-barang konstruksi besi, jang diperlukan untuk membuat dam besar, djembatan besar dan gedung, jang sekarang masih didatangkan dari luar negeri, tetapi kemudian harus dapat dibuat didalam negeri sendiri. Kita harus setia kepada dasar jang telah didjadikan pedoman ekonomi kita, bahwa segala barang pakaian dan barang kapital jang bahannja terdapat di Indonesia lambat-laun harus dikerdjakan sendiri. Ketjuali, kalau bahan itu ada tetapi tidak mentjukupi djumlahnja untuk menghidupkan suatu industri setjara ekonomis.

Lingkungan industri jang harus pula mendapat prioritet sesudah jang tersebut diatas ialah industri jang menghasilkan bahan pakaian untuk rakjat. Apabila "self-supporting" sama sekali tentang berbagai matjam pakaian tidak akan tertjapai, bahan untuk pakaian kerdja sehari-hari dan untuk pakaian rakjat djelata umumnja lambat-laun harus dapat dibuat di Indonesia sendiri. Pabrik-pabrik tekstil dan pabrik-pabrik benang harus dilengkapkan dengan perkebunan kapas dan rami. Kemadjuan teknik telah menjatakan, bahwa rami tidak sadja terpakai untuk didjadikan karung, tetapi djuga untuk bahan pakaian, saputangan, taplak medja dan lain-lainnja. Kain dril dapat diperbuat dari rami. Pakaian jang saja pakai hari ini terbut dari pada rami, jang tidak kurang baik rupanja dari dril biasa.

Tjetakan tanah air kita adalah demikian rupa, bahwa daerah Nusa Tenggara, istimewa pulau Flores, berhubung dengan iklimnja baik sekali untuk ditanami kapas. Dahulu digembar-gemborkan oleh pihak Belanda, bahwa kapas Indonesia tidak baik untuk dipintal. Bukankah utjapan itu gunanja untuk memperlindungi industri Twente? Lama sekali kita terpikat oleh pukau itu. Tetapi penjelidikan beberapa tahun pada salah satu laboratorium kita menjatakan, bahwa kapas Indonesia tidak djelek dan dapat dipintal mendjadi benang dan ditenun mendjadi kain.

Sumatera dan Kalimantan, tanahnja baik dan tjukup luas untuk ditanami rami. Produktivitet rami djauh lebih besar dari produktivitet

PERPUSTAKAAN NASIONAL

kapas, antara enam dan sepuluh kali. Tanaman kapas diatas 1 ha tanah hasilnja kira-kira satu kwintal. Djika satu ha tanah itu ditanami dengan rami, hasilnja mungkin mentjapai satu ton, jaitu sepuluh kwintal. Hanja tanaman rami adalah tanaman jang sukar, menghendaki pupuk jang tidak sedikit dan pemeliharaan jang teliti. Ini adalah soal teknik dan pengetahuan jang dapat dipeladjari, soal didikan dan latihan. Semuanja bergantung kepada kemauan. Dan rami ini adalah suatu pegangan, jang dapat menjelesaikan masalah pakaian rakjat kita, supaja dalam hal jang penting dan vital ini buat hidup kita tidak tergantung kepada luar negeri. Pengalaman dalam masa Perang Dunia kedua dengan kekurangan pakaian, sehingga sebagian besar dari rakjat kita hampir tak berbadju, tjukuplah sebagai bukti, betapa pentingnja masalah ini untuk dipetjah selekas-lekasnja. Tanaman rami dapat dilaksanakan dengan pimpinan dan petundjuk ahli dari bangsa asing. Management pabrik membuat benang dan kain tenun dari rami dapat pula diserahkan kepada orang asing, dengan perdjandjian bahwa ia sambil bekerdja harus mendidik orang kita mendjadi ahli, jang akan menggantikannja sebagai pemimpin perusahaan.

Dalam lingkungan rumah tangga terdapat berbagai matjam barang keperluan hidup sehari-hari sebagai piring, tjangkir dan gelas, jang bahannja sebagian besar terdapat ditanah air kita sendiri. Apa sebab tidak dipergiat aktivitet pembangunan kesini, jang sebenarnja dapat dilaksanakan oleh orang partikelir atau kooperasi, dibawah bimbingan Pemerintah atau dengan petundjuk tenaga-tenaga ahli jang disediakan atau didatangkan oleh Pemerintah? Tentang industri keramik ini dapat diadakan rentjana pembangunannja jang rasionil, terpentjar seluruh Indonesia menurut persediaan bahannja. Djuga tentang pabrik korek api misalnja, suatu barang jang diperlukan dalam tiap-tiap rumah tangga, dapat diadakan rentjana pembangunan jang efektif, sehingga dalam tempo beberapa tahun sadja keperluan didalam negeri dapat ditjukupi dengan produksi sendiri. Barangkali dengan tambahan satu atau dua pabrik sadja jang sederhana besarnja, maksud itu sudah tertjapai.

Tidak sadja untuk memperbesar kemakmuran djasmani perlu diadakan berbagai matjam pembangunan, tetapi djuga untuk kemakmuran rohani. Mulailah dengan kitab batjaan, buku tulis, surat kabar

PERPUSTAKAAN NASIONAL

dan buku-buku peladjaran jang semangkin hari semangkin banjak diperlukan. Disebelah buku-buku jang perlu dan harus didatangkan dari luar negeri, banjak sekali jang patut ditjetak didalam negeri. Untuk itu perlu ada pertjetakan jang baik dan lengkap, jang tersebar seluruh nusantara perlu ada beberapa pabrik kertas, besar dan ketjil, jang tersebar pula seluruh Indonesia. Disebelah itu, untuk mendjamin persediaan bahannja, mesti ada pemeliharaan hutan kaju, pinus mercusii, jang dapat mengimbangi setiap waktu keperluan industri kertas itu dalam perkembangannja.

Untuk pemeliharaan kesehatan rakjat, disebelah membangun rumah-rumah sakit dan poliklinik diseluruh daerah, perlu pula dilaksanakan berangsur-angsur pembuatan berbagai matjam obat, serum dan lain-lainnja, jang bahannja ada didapati di Indonesia ini. Penjelidikan ilmu kedjurusan ini harus mendjadi usaha jang terpenting. Rapat hubungannja dengan itu ialah pembangunan industri kimia. Salah satu bahannja jang terpenting ialah batu arang, jang ada di Indonesia kita ini, dalam djumlah jang tidak sedikit.

Memberikan kepada rakjat kita perumahan jang baik bukan sadja tanda kemadjuan kemakmuran, melainkan djuga suatu kewadjiban sosial jang paling utama. Untuk itu perlu ada bahan-bahan jang murah dan perkreditan jang lantjar djalannja. Bahan-bahan jang murah banjak tergantung pada usaha djabatan kehutanan. Hutan harus dipiara sebaik-baiknja, supaja banjak kajunja dan murah harganja. Pendidikan kepada murid-murid disekolah harus kelihatan bekasnja pada kegiatan anak-anak sekolah dan orang-orang jang telah bersekolah dalam usaha memberantas erosi dan menanam kaju-kajuan. Mereka itu hendaknja memberi petundjuk kepada orang-orang tuanja dan kepada rakjat jang bodoh umumnja, supaja djangan membabad hutan sesuka-sukanja, supaja disebelah tiap-tiap pohon jang ditebang ditanam bibit baru bakal gantinja. Dengan setjara begitu hampir seluruh rakjat desa ikut-serta memelihara hutan, harta pusaka nasional. Usaha kedjurusan ini adalah terutama urusan Pemerintah Daerah bersama-sama dengan rakjatnja.

Terhadap Pemerintah Kota dan Kabupaten, usaha sosial jang maha penting baginja ialah mengimbangi perkembangan penduduk dengan persiapan rumah-rumah baru. Tidak adanja kegiatan dalam

PERPUSTAKAAN NASIONAL

hal ini berarti kemunduran, memupuk kemiskinan. Oleh karena itu pada tiap-tiap propinsi mesti ada Bank Pembangunan jang kuat modalnja dan tjakap pimpinannja, untuk mendjadi tulang punggung dalam membuat dan memperluas perumahan rakjat.

Masih banjak lagi lingkungan rentetan industri dan keradjinan jang mengenai keperluan hidup rakjat jang dapat dibangun. Semuanja itu tak perlu disebutkan satu per satu disini. Jang tadi itu saja sebutkan guna menanam keinsjafan dalam dada kita, bahwa kita harus membangun setjara efektif dan tepat serta rasionil, sehingga dalam struktur perindustrian jang dibangun itu menurut rentjana tidak kelupaan tjabang industri jang komplementer.

Tiap-tiap lingkungan perindustrian atau pembangunan umumnja harus meliputi keseluruhannja jang bersangkutan. Di India, misalnja, pada pabrik mesin terbang di Bengalore dibuat pula wagon kereta api, oleh karena bahannja jang utama sama-sama dari aluminium. Tetapi di R.R.T., berdasarkan prinsip jang lain lagi, wagon kereta api diperbuat pada pabrik membuat rel dan lokomotif.

Tetapi dasar bagi segala pembangunan industri ialah tenaga listrik, baik dari air maupun dibangun dengan motor diesel. Oleh karena Tanah Air kita penuh dengan air dan banjak pegunungannja, maka pembangunan listrik sebanjak-banjaknja dari tenaga air sudah pada tempatnja. Selandjutnja pembangunan listrik itu djanganlah semata-mata dirangkaikan kepada pembangunan industri dan tambang. Djuga tempat kediaman rakjat, dikota dan didesa, lambat-laun harus diterangi oleh lampu listrik. Ini menambah kemakmuran djasmani dan memperbesar keinginan untuk memiliki kemakmuran rohani, keinginan ikut-serta menikmati hasil-hasil kebudajaan dan kesenian.

Pandangan sepintas lalu telah dapat membajangkan, bahwa usaha-usaha pembangunan didalam lapangan jang saja sebut tadi memakan biaja jang tidak sedikit. Tidak sedikit barang-barang kapital jang terpakai dan dipakai untuk melaksanakannja. Dalam waktu jang pandjang segala biaja itu akan ditimbulkan kembali oleh hasil jang diperoleh dari perkembangan produksi itu, malahan dalam djumlah jang berlipat ganda. Tetapi dalam waktu jang singkat biajanja itu, sekalipun dilaksanakan berangsur-angsur dalam waktu jang pandjang, djauh mengatasi kesanggupan negara untuk membelandjainja dari

PERPUSTAKAAN NASIONAL

pendapat biasa. Perintjian anggaran belandja dari tahun ketahun menundjukkan, bahwa bagian jang terbesar dari pendapatan negara terpakai untuk membiajai apa jang dikatakan pengeluaran routine, pengeluaran jang kembali berulang-ulang setiap tahun. Djadinja biaja pembangunan sebagian besar harus ditjari dengan djalan lain, dengan pindjaman luar negeri dan dengan pindjaman sukarela atau wadjib didalam negeri, jang dilakukan dengan mengeluarkan surat obligasi atau dengan mempergunakan uang dari bank.

Disebelah itu, djalan jang terbaik ialah supaja i m p o r barang-barang kapital itu dibajar dengan e k s p o r. Orang djangan salah mengerti. Saja tidak bermaksud supaja kita kembali lagi kepada „export-economie", jang mendjadi sendi perekonomian Hindia Belanda dahulu. Saja telah berkali-kali mengatakan, bahwa tudjuan ekonomi nasional kita mestilah m e n i m b u l k a n t e n a g a p e m b e l i r a k j a t j a n g s e b e s a r - b e s a r n j a. Seperti saja sebutkan tadi, tenaga produksi masjarakat harus diatur sebaik-baiknja untuk menghasilkan barang-barang keperluan hidup rakjat. Apa jang tidak dapat atau belum dapat dihasilkan sendiri h a r u s didatangkan dari luar negeri. Djadinja, i m p o r adalah sambungan jang tidak boleh tidak dari pada produksi nasional. Untuk pembajar impor itu perlu dihasilkan barang-barang buat e k s p o r.

Sampai sekarang, barang-barang ekspor kita jang terutama ialah getah, kopra, minjak dan timah. Apabila kita perlu mengimpor barang-barang kapital lebih banjak, maka perlu pula ekspor diperbesar dengan memperbesar produksi barang-barang jang dikehendaki dipasar dunia.

Selain dari usaha memperbesar ekspor barang-barang jang biasa didjual keluar, perlu diperluas produksi minjak, diintensifkan produksi bahan-bahan logam jang sudah dikerdjakan dan dimulai dengan rentjana jang teratur pembukaan tambang-tambang baru, jang akan menghasilkan berbagai matjam logam. Dinegeri kita djuga terdapat uranium, jang djuga bisa digali dan didjual untuk pembajar impor. Tetapi tambang dan industri logam jang berbagai rupa itu tidak sadja berguna untuk pembajar impor, tetapi djuga menghasilkan bahan untuk industri dalam negeri kelak.

Soalnja ialah, bahwa pada permulaannja tambang dan pabrik itu harus dibangun dengan kapital jang tidak ada pada kita sendiri. Pada

PERPUSTAKAAN NASIONAL

umumnja, biaja untuk membangun produksi, jang akan menghasilkan kelak berlipat ganda dari ongkos mendirikannja, boleh diperoleh dengan p i n d j a m a n. Ini teori, tetapi betapa kemungkinan melaksanakannja didalam praktik? Rentjana jang tepat dan djelas tentang ini barangkali dapat mempermudah djalan untuk memperoleh pindjaman itu. Pembuatan rentjana itu harus didahului dengan penjelidikan geologi tentang keadaan dan tempat bahan-bahan logam itu terpendam didalam pangkuan bumi Indonesia.

Pada dasarnja, modal pindjaman untuk membangun industri tambang itu lebih mudah memperolehnja, apabila rentjananja diperbuat atas dasar penjelidikan ilmiah tadi. Tambang merupakan kantong jang isinja tidak tohar sendirinja, melainkan hanja habis dikorek. Modal pindjaman itu dapat dibajar kembali berangsur-angsur dengan hasil tambang itu. Oleh karena itu, politik perekonomian jang tepat dalam hal pembangunan tambang oleh negara jang tak punja kapital ialah. m e m b i a j a i p e m b a n g u n a n n j a d e n g a n m o d a l p i n d j a m a n j a n g d a p a t d i a n g s u r m e m b a j a r n j a k e m b a l i d e n g a n h a s i l t a m b a n g i t u s e n d i r i.

Pemerintah jang dipertjaja lebih mudah memperoleh pindjaman itu dari pada orang partikulir Indonesia jang tidak mempunjai modal jang tjukup. Sebab itu tepat sekali apabila industri tambang dilaksanakan oleh Pemerintah sendiri. Pemerintah itu boleh djadi Pemerintah pusat atau Pemerintah daerah atau kedua-duanja bersama-sama. Ada baiknja Pemerintah daerah ikut serta melaksanakan pembangunan industri tambang didaerahnja, karena dengan hasil tambang itu ia memperoleh biaja untuk melaksanakan tugasnja sebagai pemerintahan otonomi. Pendirian ini sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang Dasar kita, pasal 38 ajat 3, bahwa „bumi dan air dan kekajaan alam jang terkandung didalamnja dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar kemakmuran rakjat".

Dengan pernjataan ini sampailah saja dengan sendirinja kepada pokok masalah p o l i t i k p e r e k o n o m i a n kita: Siapakah jang harus memegang peranan jang terutama dalam pembangunan perekonomian masjarakat, Pemerintahkah atau orang partikulirkah?

PERPUSTAKAAN NASIONAL

Didalam suatu negeri jang baru sadja merdeka dari belenggu pendjadjahan, seperti Indonesia kita ini, kita dapat memahami, apabila banjak sekali orang jang menginginkan supaja inisiatif diberikan kepada orang-orang partikulir. Banjak pengusaha nasional jang ingin memperoleh kesempatan untuk berkembang. Tempat jang selama ini diduduki oleh bangsa asing sekarang dituntut, supaja diluangkan untuk mereka, dengan dalil „mengubah ekonomi kolonial mendjadi ekonomi nasional". Partai-partai politik dipergunakan untuk melaksanakan tudjuan itu. Pemerintah dituntut supaja memperlindungi perusahaan-perusahaan nasional jang baru berkembang itu terhadap perusahaan-perusahaan asing jang lebih kuat kapitalnja, rapi organisasinja dan banjak pengalamannja. Perlindungan itu dikehendaki djuga terhadap luar negeri, jang dapat menghasilkan barang jang serupa dengan harga jang djauh lebih murah. Dari Pemerintah dikehendaki supaja aktivitetnja dalam perekonomian terbatas hingga menjelenggarakan perusahaan jang bersifat "public utilities", seperti perusahaan air, listerik, gas, pos-telegrap-dan-telepon dan lain-lainnja. Jang selebihnja itu hendaknja diserahkan kepada inisiatif partikulir nasional sadja. Modal jang kurang hendaklah dibantu dengan kredit oleh Pemerintah. Atau, mereka diperbolehkan memperolehnja dari bangsa asing sebagai kredit atau dengan ikut-serta dalam perusahaan tjampuran.

Kita mengerti, apabila axiomata kapitalisme sebagai merdeka bertindak dan merdeka bersaing, bebaskan orang-seorang mentjari djalannja sendiri dalam perekonomian, sangat menarik bagi pengusaha-pengusaha kita, jang dadanja dibakar oleh semangat „Sturm-und-Drang". Terlepas dari belenggu kolonialisme jang mengikat, "newcomers" madju kemuka berdujun-dujun, seolah-olah pada tiap-tiap pendjuru alam terletak sumber keuntungan, jang mengubik dan memanggil.

Tetapi pengalaman jang pahit dalam masa delapan tahun ini menundjukkan, bahwa tjita-tjita partikulir itu meleset sama sekali. Kaum kapitalis kita terlambat lahirnja, ia sudah ketinggalan kereta. Dengan pandangan hidupnja sekarang beserta modal jang ada padanja masing-masing, mereka sekurang-kurangnja satu setengah abad ketinggalan dari perdjalanan masa. Kapitalisme jang berdasarkan laissez-faire jang meletakkan orang-seorang dimuka sebagai pertin-

PERPUSTAKAAN NASIONAL

dak jang mengambil i n i s i a t i f dan memikur r i s i k o, sudah berkembang dan berubah sifatnja dari pemegang konkurensi mendjadi monopoli. Dari individualisme semata-mata, mau tak mau ia menerima berbagai tjorak sosial atas pengaruh perdjuangan kelas, dan pula untuk mendjaga perdamaian sosial dalam dunia perusahaan. Berbagai peraturan jang mendjadi beban baginja guna mentjapai kegembiraan bekerdja bagi kaum buruh, peraturan tentang djaminan sosial, jang dahulu tabu baginja sebagai impian sosialis, sekarang dipertahankannja sebagai suatu keharusan. Semuanja ini tidak terpenuhi oleh kebanjakan kapitalis muda kita.

Untuk mempunjai kedudukan jang berpengaruh dalam perekonomian dunia sekarang, suatu perusahaan kapitalis memerlukan dasar modal jang — djika dihitung dengan uang kita — berbilang miljard rupiah. Barulah orang dapat ikut-serta dalam pembangunan masjarakat

Tetapi di Indonesia kita ini orang mau mendjadi kapitalis dengan modal jang berbilang djuta rupiah sadja. Dengan persediaan jang tidak berarti itu orang mau melaksanakan tindakan jang bertjorak inisiatif partikulir. Tetapi bagaimana risikonja? Pada umumnja, sebagian besar dari pada risiko itu mau dipikulkan kepada Pemerintah. Itu berarti kepada masjarakat.

Memang, kita akui, sedjak bangsa kita memperoleh kemerdekaannja sudah banjak djuga orang jang meningkat dari tiada mendjadi berada. Tidak semuanja dengan melalui djalan tjatut dan avonturisme. Ada djuga jang madju meningkat karena usaha dan kegiatan sendiri, karena memang mengalir dalam tubuhnja darah pertindak. Banjak perusahaan Indonesia kelihatan berkembang, sekalipun ketjil djumlahnja dan miniatur tampaknja, djika dibandingkan dengan perusahaan asing jang ada disini. Golongan importir dan kaum-tengah sudah banjak diisi dengan bangsa kita, orang Indonesia. Orang-seorang jang kaja-kaja sudah banjak kelihatan. Memang, beberapa ratus manusia Indonesia sudah dapat memperbaiki deradjat hidupnja, bertambah besar kemakmurannja. Tetapi, bagaimana keadaan rakjat kita seluruhnja?

Miskin, tetap miskin, dengan tidak ada perspektif. Keadaan masjarakat kita sekarang hanja menjatakan pertentangan jang hebat antara

PERPUSTAKAAN NASIONAL

kaja dan miskin, antara sekelompok manusia jang berada dan hidup mewah dan massa jang banjak jang tidak berada. Tidak sedikit pula djumlah rakjat jang hidup sengsara dan menderita. Sedjarah dunia, di Barat dan di Timur, tjukup membuktikan, bahwa pertentangan sosial jang seperti itu dalam masjarakat lambat-laun akan berachir pada revolusi sosial.

Kepada orang Islam jang telah lupa daratan, ingin saja memperingatkan firman Tuhan dalam al Qur'an:

„Wailul likulli humazatil lumazah,
Allazi djama'a ma lau wa'addadah,
Jahsabu anna maalahu achladah,
Kalla lajunbazhanna fil-huthamah".

Artinja:

„Berhati-hatilah orang jang pendusta dan penista,
Jang mengumpul-ngumpulkan harta dan menghitung-hitungnja,
Dengan menjangka, bahwa hartanja akan mendjaminnja selama-lamanja,
Tidak, dia akan dihamburkan kedalam api jang membakarnja".

Suatu peringatan lagi didalam Surat Attakaasur, al Qur'an 102:
„Perlombaan memperbesar kekajaan mendjadikan engkau berbuat tak atjuh". (Alhaakumut takaasur).

Lebih dari dimasa manapun djuga, sekarang inilah saatnja untuk menanam firman dan peringatan Tuhan itu didalam hati!

Hadirin jang terhormat! Pengalaman saja dimasa jang lampau, sebagai seorang tempat mengadu dan minta tolong, memperlihatkan kepada saja, bahwa didalam masjarakat kita banjak djuga diantara angkatan muda orang-orang jang mempunjai inisiatif dan konsepsi jang sehat, tetapi tidak mempunjai modal untuk melaksanakan tjita-tjitanja didalam praktik. Pertjobaan dengan beberapa orang dengan bantuan kredit Pemerintah, jang disalurkan dengan perantaraan Bank Industri Negara, menjatakan, bahwa mereka itu memang tjakap dan sungguh bekerdja.

Banjak pula permintaan kredit saja lihat untuk membuka pabrik-pabrik baru. Ada muntjul kemauan untuk meninggalkan lapangan perniagaan dan menempuh djalan pembangunan industri, dengan

PERPUSTAKAAN NASIONAL

keberanian memikul risiko. Tetapi segala inisiatif ini terbentur pada kekurangan kapital. Ada jang ingin mendirikan suatu pabrik dengan kapital sebesar 20, 30 atau 40 djuta rupiah. Tetapi kapital sendiri, jang dikumpul bersama oleh mereka jang mengambil inisiatif, djarang melebihi 5 djuta rupiah. Untuk mentjukupkan jang selebihnja diminta kredit djangka pandjang dari Pemerintah.

Maka sekarang timbul pertanjaan. Kalau bagian jang terbesar dari pada kapital perusahaan itu harus disediakan oleh Pemerintah, apakah tidak lebih baik dan lebih mudah, apabila perusahaan itu didirikan sadja sebagai perusahaan Pemerintah? Atau sebagai perusahaan tjampuran, jang kapitalnja disediakan oleh Pemerintah dan orang-orang partikulir?

Saja kira, inilah djalan jang sebaik-baiknja. Dalam kedua matjam bangunan itu, perusahaan Pemerintah atau perusahaan tjampuran dengan saham jang terbanjak ditangan Pemerintah, pimpinan perusahaan dapat diletakkan ditangan orang partikulir jang tjakap. Pemerintah dapat membatasi diri dengan mengadakan kontrole sadja, dengan mendjaga supaja pimpinan tidak keluar dari rel dan tidak mengabaikan kepentingan umum. Dengan tjara begini, tenaga jang berinisiatif dalam masjarakat dapat ditampung, disalurkan aktivitetnja kedjurusan menjelenggarakan kepentingan umum. Kapital jang tersebar dalam masjarakat, jang belum mendapat pekerdjaan dalam salah satu perusahaan jang ada, dapat diaktifkan guna pembangunan.

Pengusaha Indonesia jang dapat berdiri sendiri, sanggup memiliki perusahaan industri dengan hanja bantuan bank dengan kredit usaha — kredit untuk melantjarkan perputaran — tidak terlalu banjak djumlahnja. Mereka ini boleh berdiri terus sebagai pengusaha partikulir, dengan pula memperoleh kesempatan untuk memperbesar perusahaannja dengan djalan simpanan intern, sebagai tjadangan dan penjusutan jang tepat. Hanja dalam lingkungan ekonomi jang terpimpin sepak terdjangnja harus disesuaikan dengan rentjana jang tertentu. Terhadap jang selebihnja itu, jang mempunjai inisiatif dan kesanggupan, tetapi tidak mempunjai tjukup kapital, sebaik-baiknja tenaga dan kapital mereka jang sedikit itu disalurkan keperusahaan Pemerintah. Inilah djalan jang rasionil dan efektif.

PERPUSTAKAAN NASIONAL

Bukti jang njata didalam masjarakat tentang keadaan faktor-faktor produksi jang ada tidak memungkinkan penjelesaian jang lain, kalau benar-benar kita mau melaksanakan ekonomi pembangunan, jang akan menghasilkan kemakmuran bagi masjarakat seluruhnja. Kenjataan jang lahir sadja di Indonesia, terlepas dari segala ideologi, membuktikan, bahwa perekonomian Indonesia tidak sanggup berkembang mendjadi perekonomian kapitalis. Sjarat-sjarat untuk menumbuhkannja kesitu tidak ada dalam masjarakat Indonesia. Perusahaan-perusahaan kapitalis nasional jang sedang besarnja dapat tumbuh, tetapi h a n j a dengan p e r l i n d u n g a n P e m e r i n t a h senantiasa. Tiap-tiap proteksi berarti memperbesar ongkos jang tidak sedikit serta memahalkan harga jang harus dibajar oleh masjarakat seluruhnja. Untuk menguntungkan suatu golongan ketjil, rakjat seluruhnja dirugikan. Pemerintah nasional manakah, jang bersedia melakukan politik seperti itu terus-menerus? Dan pembangunan jang akan melimpahkan kemakmuran kepada masjarakat seluruhnja tidak akan berhasil, apabila usaha itu dipusatkan pada kaum kapitalis nasional jang ketjil-ketjil itu, jang untuk bekerdja perlu perlindungan Pemerintah lebih dahulu.

Dalam keadaan Indonesia sekarang, hanja Pemerintah jang sanggup melaksanakan pembangunan jang besar-besar atau agak besar. Orang tak perlu mendjadi seorang sosialis untuk mengakui kenjataan ini. Seorang sosialis gembira, bahwa kenjataan memaksakan untuk melaksanakan tjita-tjitanja dan teorinja. Seorang kapitalis Indonesia terpaksa, mau tak mau, menerima kenjataan itu. Dalam praktek perekonomian ia tak rugi, karena tenaganja dan kapitalnja jang sedikit itu dapat disalurkannja kedalam perusahaan jang dikuasai Pemerintah, dimana faktor-faktor produksi dapat dipergunakan dengan tjara jang lebih rasionil. Sebagai individu ia tidak sadja terlepas dari memikul risiko, akan tetapi memperoleh pula achirnja pendapat jang lebih besar.

Keadaan jang lahir sadja di Indonesia telah membuktikan, bahwa pembangunan perekonomian masjarakat hanja mungkin, apabila Pemerintah memegang peranan jang terutama. Maka karena itu tepat pula ketentuan jang tertulis didalam pasal 38 Undang-undang Dasar kita, jaitu:

PERPUSTAKAAN NASIONAL

1. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.

2. Tjabang-tjabang produksi jang penting bagi Negara dan jang menguasai hadjat hidup orang banjak dikuasai oleh Negara.

3. Bumi dan air dan kekajaan alam jang terkandung didalamnja dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakjat.

Sengadja saja ulang menjebut disini bunji pasal 38 Undang-undang Dasar jang telah begitu terkenal itu, semata-mata untuk menekankan, supaja dari mulai sekarang kini i n i l a h hendaknja mendjadi pedoman bagi Pemerintah untuk melaksanakan politik perekonomian. Saja ingin menekankan dasar jang prinsipiil ini disini, karena sampai sekarang sering orang pura-pura lupa akan adanja dan menjimpang kepolitik liberalisme, jang tak ada sendinja didalam Undang-undang Dasar Negara kita.

Menurut djiwa pasal 38 ini, Pemerintah mempunjai tugas dan peranan jang utama dalam pembangunan perekonomian masjarakat. Negara menguasai dikatakan. Itu tidak berarti, seperti telah djelas saja uraikan tadi, bahwa Pemerintah sendiri dengan birokrasinja duduk sebagai pertindak. Dikuasai oleh negara berarti, bahwa Pemerintah merentjanakan dan mengontrole djalannja perusahaan. Pimpinan perusahaan itu sendiri diletakkan ditangan orang jang tjakap. Perusahaan, kepunjaan Pemerintah maupun kepunjaan partikulir, takluk kebawah hukum ekonomi perusahaan jang serupa, jang dikuasai oleh prinsip ekonomi.

Menurut pendapat ini, setiap waktu Pemerintah harus bertindak korektif kalau ada perekonomian jang matjet pada sektor apapun djuga jang menguasai hidup orang banjak. Kalau umpamanja pada sektor ekspor organisasi dagang jang ada tidak sanggup melaksanakan tugasnja karena salah satu sebab, Pemerintah dapat mengadakan organisasi sendiri untuk mendorong djalannja ekspor jang matjet itu. Pemerintah djuga dapat menugaskan organisasi jang ada itu untuk melakukan ekspor atas tanggungan dan risiko Pemerintah.

Dasar bagi orang-orang partikulir untuk berusaha sendiri atau ikutserta pada perusahaan negara tertanam didalam Undang-undang Dasar pasal 37, ajat 2 dan 3. Disitu tertulis:

PERPUSTAKAAN NASIONAL

„Dengan tidak mengurangi pembatasan jang ditentukan untuk kepentingan umum dengan peraturan-peraturan undang-undang, maka kepada sekalian orang diberikan kesempatan menurut sifat, bakat dan ketjakapan masing-masing untuk turut-serta dalam perkembangan sumber-sumber kemakmuran negeri.

„Penguasa mentjegah adanja organisasi-organisasi jang bersifat monopoli partikulir jang merugikan ekonomi nasional menurut peraturan-peraturan jang ditetapkan dengan Undang-undang".

Disini dinjatakan hak bagi orang-seorang — kepada s e k a l i a n orang, disebut disitu — untuk ikut-serta dalam pembangunan perekonomian negara, dan djuga kewadjibannja. Tetapi njatalah, bahwa titik berat dari pada pembangunan perekonomian negara dan masjarakat terletak pada Pemerintah dan pada kooperasi. Jang besar-besar diusahakan oleh negara, jang ketjil dan sedang diselenggarakan berangsur-angsur oleh kooperasi. Diantara lapangan jang dua itu, masih luas daerah jang dapat ditempuh untuk sementara waktu oleh inisiatif partikulir. Hanja inisiatif partikulir ini — seperti disebut tadi — harus menjesuaikan diri kepada rentjana jang diperbuat oleh Pemerintah.

Kooperasi diutamakan sebagai soko-guru ekonomi Indonesia, karena kooperasi mendidik self-help dan tertudju untuk membela kepentingan bersama sebagai bagian dari masjarakat. Kooperasi sebagai jang kita pahamkan di Indonesia mempunjai sifat kemasjarakatan. Masalah ini tidak dapat saja kupas disini dengan mendalam. Siapa jang ingin mengetahui pandangan saja, batjalah beberapa uraian saja jang diutjapkan pada Hari Kooperasi.

Diantara kita masih ada orang jang ragu-ragu dan bertanja: „Apakah jang dimaksud dengan usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan itu benar-benar kooperasi?"

Buah pikiran jang tertanam didalam pasal 38 Undang-undang Dasar sekarang ini berasal dari saja sendiri, jang saja madjukan dahulu waktu Panitia Penjelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan kita sedang menjusun rantjangan Undang-undang Dasar Republik Indonesia. Sebab itu terimalah pernjataan saja, bahwa memang kooperasilah jang dimaksud dengan „usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan".

PERPUSTAKAAN NASIONAL

Hadirin jang terhormat! Dengan ini saja kira tjukup djelas saja uraikan, bahwa peranan terutama dalam pembangunan perekonomian masjarakat kita, agar terlaksana kemakmuran dan kebahagiaan rakjat, harus dipegang oleh Pemerintah. Dan, apabila pembangunan itu dilaksanakan menurut rentjana jang disusun tiap kali untuk lima tahun, maka kembali saja kepada pertanjaan jang saja adjukan pada permulaan pidato saja: apa jang mendjadi tudjuan pokok dari pada pembangunan itu dan bagaimana kita menetapkan langkah jang tegas kedjurusan itu?

Sebagai patokan bekerdja kita harus memegang dua hal lebih dulu.

Pertama, kita harus melaksanakan pembangunan demikian rupa, sehingga pada achir masa jang diliputi oleh rentjana 5 tahun pertama pendapatan nasional naik merata dengan 15%.

Kedua, dalam waktu jang singkat, dua atau tiga tahun sebelum berachir plan 5 tahun kedua, rakjat Indonesia sudah bisa hidup dengan beras jang dihasilkannja sendiri. Kita tidak perlu mengimpor beras lagi.

Dalam hubungan jang dua ini, jaitu mentjapai kenaikan pendapatan nasional dengan 15% pada achir masa plan 5 tahun pertama dan mentjapai self-supporting dalam hal beras dalam beberapa tahun, perlu sekali diperhatikan suatu faktor dinamis, jaitu bahwa penduduk Indonesia bertambah setahun kira-kira 1.300.000 orang. Ini, apabila dihitung bahwa tambahan penduduk itu berdjumlah 1,5% setahun. Apabila tambahan itu ditaksir 1,7% setahun, maka tambahan djiwa itu berdjumlah 1.500.000 setahun sedjak tahun ini. Pada achir tahun 1960 penduduk Indonesia akan berdjumlah kira-kira 90 djuta orang.

Sekarang penduduk Indonesia djumlahnja kira-kira 85 djuta orang. Apabila dihitung bahwa tiap-tiap orang memakan beras 100 kilo setahun, maka konsumsi beras dalam tahun 1957 akan berdjumlah 8,5 djuta ton. Produksi sampai sekarang baru mentjapai 7,5 djuta ton setahun. Djadinja, kalau konsumsi dihitung 100 kilo seorang setahun, maka kekurangan beras tahun ini berdjumlah satu djuta ton. Impor hanja berdjumlah kira-kira setengah djuta atau 600.000 ton setahun, schingga kita dapat mengambil kesimpulan bahwa konsumsi seorang setahun rata-rata kurang dari 100 kilo beras. Apabila diketahui, bahwa seorang setahun perlu memakan 160 kilo zat tepung,

PERPUSTAKAAN NASIONAL

terdiri dari beras, djagung dan ketela atau sagu, maka perhitungan 100 kilo beras untuk seorang setahun belumlah lagi suatu luxe, sekalipun merupakan suatu kebaikan dari sekarang.

Tambahan produksi beras sampai sekarang djumlahnja 200.000 ton setahun. Tambahan konsumsi djumlahnja 1,5 djuta kali 100 kilo, jaitu 150.000 ton. Kalau diingat, bahwa kekurangan sekarang — menurut perhitungan seorang 100 kilo setahun — berdjumlah 1 djuta ton, maka sesudah 20 tahun kita baru mentjapai self-supporting. Masa ini terlalu lama. Melihat luasnja tanah air kita, maka dengan rentjana jang tepat, dengan memberikan prioritet kepada penambahan bahan makanan ini, tudjuan itu dapat ditjapai dalam beberapa tahun sadja. Menurut perhitungan jang saja peroleh, dengan biaja 1½ á 2 miljard rupiah dalam lima tahun tudjuan itu dapat terlaksana.

Disini saja tidak akan menurun sampai kedetail masalah ini. Angka-angkanja sudah terkumpul, dalam musjawarah dapat diperbintjangkan nanti. Hanja disini saja ingin menegaskan, bahwa Musjawarah Pembangunan Nasional ini dapat kiranja mengambil keputusan, bahwa dalam masa 5 tahun kita sudah self-supporting dalam hal makanan. Tidak sedikit devisen jang dapat dihematkan karena itu, sehingga dapat dipergunakan untuk mengimpor barang-barang kapital untuk industri.

Dengan ini sampailah saja pada achir uraian saja. Banjak lagi masalah jang penting-penting tidak saja singgung. Semuanja itu dapat dikupas dan diputuskan nanti dalam musjawarah.

Mudah-mudahan musjawarah ini diberkati oleh Allah Jang Maha-Kuasa, lantjar djalannja dan dapat menjelenggarakan suatu keputusan mufakat jang benar-benar mendjadi sendi dan suluh dalam pembangunan negara dan masjarakat.

Sekianlah!

PERPUSTAKAAN NASIONAL

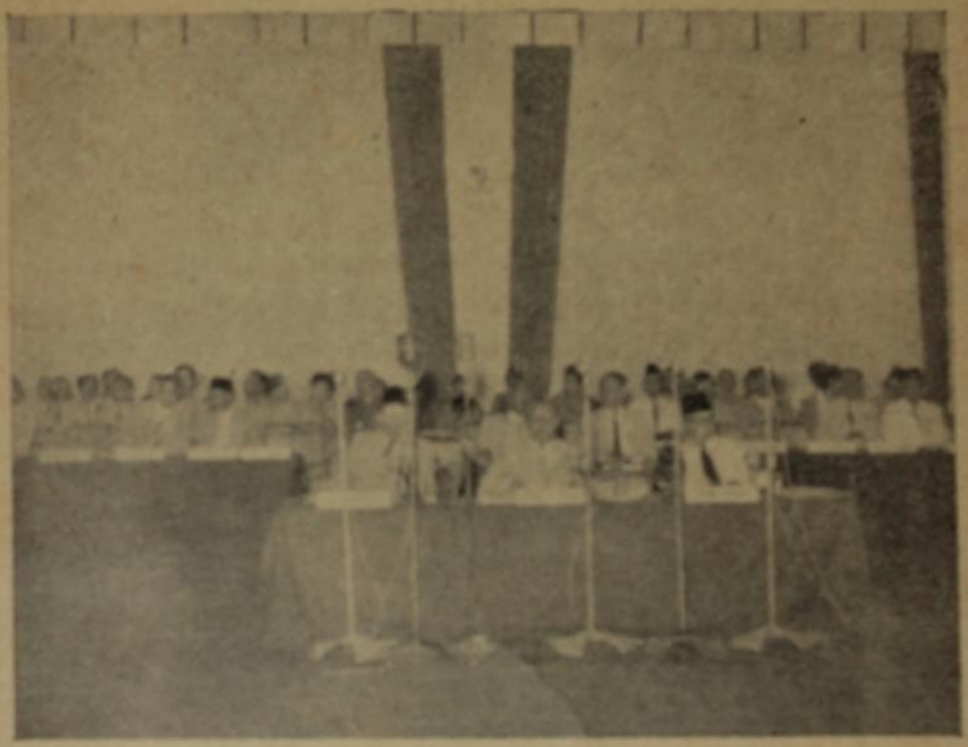

Ketiga tokoh Soekarno, Hatta dan Djuanda dimedja pimpinan Munas Pembangunan.

PERPUSTAKAAN NASIONAL

PERPUSTAKAAN NASIONAL

PRASARAN
PERDANA MENTERI DJUANDA

Paduka Jang Mulia Presiden,

Bung Hatta jang kami muliakan,

Para Hadirin jang terhormat,

Sebagaimana telah diterangkan dalam Keterangan Pemerintah tanggal 8 Nopember 1957 dihadapan Dewan Perwakilan Rakjat, maksud Pemerintah mengadakan Musjawarah Nasional Pembangunan jang dimulai hari ini jaitu:

P e r t a m a : Untuk melaksanakan beberapa putusan Musjawarah Nasional dalam lapangan pembangunan, waktu mana telah diterangkan bahwa Pemerintah menganggap perlu dan disetudjui oleh Musjawarah Nasional untuk melandjutkan pembitjaraan mengenai soal-soal pembangunan dengan setjara mendalam daripada waktu Musjawarah Nasional, jang sifatnja sebetulnja lebih politis dan chusus membitjarakan persoalan-persoalan Angkatan Darat.

K e d u a : Untuk mempersiapkan dasar-dasar untuk Rentjana Pembangunan Nasional jang meliputi segala segi kehidupan dan penghidupan Bangsa, menudju masjarakat jang adil, makmur dan sentausa, sesuai dengan kepribadian rakjat Indonesia.

K e t i g a : Mengadakan persiapan-persiapan untuk mendjamin penjaluran rentjana tersebut kearah pelaksanaan dan ikutsertanja rakjat dalam perentjanaan dan pelaksanaan pembangunan.

Pemerintah berpendapat bahwa tidak ada baiknja kita menunggu lebih lama untuk menjelenggarakan Musjawarah Nasional Pembangunan ini oleh karena Pemerintah bermaksud selain dari melaksanakan putusan-putusan Musjawarah Nasional dahulu, pada 1 Djanuari 1958 dengan mulai berlakunja Anggaran Belandja 1958, pula oleh karena dirasa perlu sekali pada tahun 1958 itu, Pemerintah dapat mengambil keputusan-keputusan dan tindakan-tindakan jang prinsipil dilapangan perekonomian dan pembangunan sambil

PERPUSTAKAAN NASIONAL

menunggu atau mendahului pengesahan Undang-undang dilapangan tersebut oleh Dewan Perwakilan Rakjat.

Melihat banjaknja perundang-undangan dilapangan perekonomian dan pembangunan umumnja, misalnja Rentjana Pembangunan Lima Tahun, rantjangan Undang-undang Penanaman Modal Asing, rantjangan Undang-undang Pertambangan, tidak mungkin kelihatannja segala perundang-undangan itu dapat diselesaikan misalnja dalam pertengahan tahun pertama dari tahun 1958.

Pula oleh karena Undang-undang Anggaran Belandja 1958 baru dapat mulai dibitjarakan dan diselesaikan pada permulaan tahun 1958.

Djika Musjawarah Nasional Pembangunan ini berhasil — atas dasar forum nasional jang luas — merumuskan dengan djelas policy Negara diberbagai lapangan perekonomian, hal ini akan sangat memudahkan dan mendjadi "backing" buat Pemerintah dalam mengambil keputusan-keputusan sementara jang tidak dapat menunggu lebih lama lagi, misalnja jang amat mendesak jaitu ketegasan dalam kebidjaksanaan dilapangan pertambangan, pemberian konsessi-konsessi baru, tjara-tjara kerdja-sama dengan modal asing, jang djika didasarkan atas putusan jang djelas dari Musjawarah Nasional Pembangunan ini dapat dipergunakan oleh Pemerintah sebagai pedoman dalam mengambil keputusan-keputusan jang bersifat sementara.

Tjontoh-tjontoh tadi hanja sekedar untuk memberikan gambaran tentang persoalan-persoalan jang dihadapi oleh Pemerintah dilapangan pembangunan.

Ada baiknja kita sebentar menengok kebelakang dan melihat tjara-tjara dan hasil-hasil pembangunan diwaktu jang silam, sebetulnja mulai tahun 1950, oleh karena sebelumnja itu pembangunan dalam arti kata sesungguhnja selama masa revolusi bergolak belum mungkin dimulainja setjara teratur.

Tidak dapat disangkal untuk orang-orang jang bersedia melihat setjara objektif perubahan-perubahan dinegara kita ini, bahwa dalam periode 1950 sampai 1957 ini telah ditjapai hasil-hasil jang njata, misalnja dilapangan pendidikan, dilapangan sosial, dilapangan perdagangan, perindustrian dan "public utilities" seperti djalan-djalan, perhubungan, irigasi, air minum, kalau kita bandingkan keadaan

PERPUSTAKAAN NASIONAL

pada tahun ini dengan saat penjerahan kedaulatan setjara formil dari tangan Pemerintah Belanda pada achir tahun 1949.

Akan tetapi kenjataan pula bahwa pembangunan dimasa tersebut tadi itu banjak sekali memperlihatkan kekurangan-kekurangan, kesimpang-siuran dan pemborosan-pemborosan jang tidak dapat dibiarkan terus-menerus.

Dalam hal ini saja sebut pula fakta-fakta jang njata menjimpang dari norma-norma kedjudjuran i.c. korupsi, pembangunan untuk diri sendiri atau untuk sesuatu golongan ketjil, hal mana terang-terangan menjimpang dari pasal 38 Undang-undang Dasar Sementara kita.

Disamping itu kembali lagi kepada tjara-tjara kita bekerdja, njata sekali bahwa sampai sekarang ini tiap-tiap Kementerian dan Djawatan-djawatan umumnja mempunjai rentjana sendiri tersendiri dan sungguh belum tjukup koordinasi jang mendjamin bahwa pembangunan itu berdjalan setjara teratur dan terpimpin, hingga tjara demikian ini menimbulkan banjak kerugian dan kegagalan.

Pada achir-achir ini timbul soal pembangunan kedaerahan jang memperlihatkan tendens-tendens jang membahajakan pula untuk pembangunan nasional Republik Indonesia sebagai satu kesatuan dan satu "economic unit".

Soal kedaerahan ini terang merugikan ichtiar-ichtiar jang amat penting untuk Negara sebagai keseluruhan, misalnja dilapangan industrialisasi terutama industri berat, oleh karena dengan menekankan aksen pada pembangunan daerah sadja dengan melupakan rangka keseluruhan, kapasitet investasi kita — jang njata terbatas itu — akan hantjur dalam berbagai pekerdjaan-pekerdjaan jang setjara lokal tidak dapat disangkal pentingnja akan tetapi, dalam prioritet keseluruhannja, diharuskan ada batas-batasnja untuk memungkinkan pemberian prioritet pada objek-objek nasional.

Maka dari itu lebih terasa pada saat ini kebutuhan atas Rentjana Pembangunan Nasional setjara overall jang sebagai dikatakan tadi meliputi segala segi kehidupan dan penghidupan Bangsa sesuai dengan kepribadian Rakjat Indonesia menudju masjarakat jang adil, makmur dan sentausa.

Pengertian Pemerintah tentang Rentjana Pembangunan Nasional ini, meliputi pembangunan dilapangan sosial, pendidikan, keagamaan dan

PERPUSTAKAAN NASIONAL

kebudajaan, pembangunan nasional dan pembangunan daerah, lapangan produksi maupun pembangunan Angkatan Perang.

Sebagai saja katakan tadi kepada Dewan Perwakilan Rakjat oleh Kabinet jang lalu telah disampaikan rantjangan Undang-undang tentang Rentjana Pembangunan Lima Tahun 1950, 1960 dan Pemerintah sekarang pada umumnja dapat mengoper Rentjana Pembangunan Lima Tahun itu, walaupun berhubung dengan berbagai perubahan-perubahan dalam tahun 1956 dan 1957, terutama dalam pemberian subsidi kepada daerah-daerah otonom perlu diadakan koreksi terhadap beberapa angka-angka jang dimuat dalam rentjana itu.

Selandjutnja bersandarkan atas penjelidikan jang lebih teratur jang didjalankan oleh 13 team dari Biro Perantjang Negara keberbagai daerah dan atas hasil pertukarfikiran dengan berbagai instansi didaerah-daerah perlu pula diadakan berbagai perubahan-perubahan dalam angka-angka mengenai regional planning, maka Pemerintah sementara belum menjatakan kepada Dewan Perwakilan Rakjat setjara resmi tentang kesediaan Pemerintah sekarang ini untuk mengoper rantjangan Undang-undang termaksud.

Pemerintah mengharapkan sebagai hasil Musjawarah Nasional Pembangunan ini saran-saran dan perubahan-perubahan dalam rentjana semula, terutama dalam lapangan kebidjaksanaan ekonomis diberbagai lapangan, agar supaja Rentjana Pembangunan itu dapat lebih disesuaikan dengan pikiran-pikiran dan pendapat-pendapat pada forum nasional ini.

Selandjutnja dalam rantjangan Undang-undang Pembangunan Lima Tahun tersebut tadi dengan sengadja tidak dimasukkan soal-soal militer; dalam lapangan pembangunan dalam Rentjana Lima Tahun itu dibatasi pada sektor sosial dan perekonomian, sedangkan angka-angkanja didasarkan atas penjelidikan jang teliti tentang kemampuan kita untuk membiajai pembangunan djangka pandjang ini berdasarkan besarnja investasi-investasi jang telah dilakukan oleh Pemerintah selama periode 1950 sampai dengan 1955, djadi berarti tidak melampaui batas kemampuan Anggaran Belandja disektor Pemerintah dan kemampuan masjarakat partikelir untuk sektor partikelir, sehingga dengan demikian pembangunan Angkatan Perang dapat dilandjutkan

PERPUSTAKAAN NASIONAL

atas dasar angka-angka pengeluaran routine dan pengeluaran modal dalam tahun-tahun 1950 sampai dengan 1955 pula.

Dalam tahun-tahun 1950 sampai dengan 1955 ini pengeluaran routine dan pengeluaran modal dibidang militer sebetulnja, djika dilakukan setjara lebih teratur, setjara lebih tjermat dan teliti menurut prioritet-prioritet jang ditetapkan terlebih dahulu masih dapat dilakukan pembangunan jang tjukup berarti, dengan mentjari tambahan-tambahan dari luar berupa kredit atas pembelian-pembelian equipment, misalnja kapal-kapal, peralatan-peralatan lain, sehingga pembangunan dapat dipertjepat dengan tidak perlu mengurangi investasi dalam lapangan produksi sebagaimana telah ditetapkan dalam Rentjana Pembangunan Lima Tahun tadi.

Dalam hal ini Pemerintah terutama berpendapat, bahwa dengan diadakannja ratio dalam banjaknja Anggauta Angkatan Darat, diselenggarakannja peremadjaan, penjaluran anggauta tentara jang sudah melampaui batas usia kelapangan produksi, kita dapat menudju kesuatu Angkatan Perang jang tidak perlu kwantitetnja lebih besar dari sekarang ini, akan tetapi toch mempunjai "efficiency" dan "power" jang lebih besar.

Sebagaimana halnja dilapangan sipil, pula di Angkatan Perang masih dapat diadakan perbaikan-perbaikan dalam organisasi-organisasi dan administrasi jang bisa menghemat pengeluaran routine untuk dipergunakan buat pembangunan Angkatan Perang.

Pemerintah dengan sengadja pada Musjawarah Nasional Pembangunan ini mentjantumkan pula sebagai salah satu atjara soal pembangunan Angkatan Perang, agar supaja ada pengertian jang lebih baik dari kedua belah fihak, sipil maupun militer tentang kebutuhan masing-masing golongan, fihak militer supaja mengetahui dan menginsjafi bagaimana terbatasnja kemampuan Negara untuk menjediakan Anggaran biaja, terutama devisen untuk Angkatan Perang jang dengan segala susah-pajah kita harus sediakan buat kebutuhan-kebutuhannja.

Disamping itu diharapkan dari fihak sipil pengertian atas kewadjiban kita sebagai Negara jang merdeka untuk memelihara, memperbaiki dan membangun Angkatan Perang kita dan kepolisian kita untuk memelihara keamanan jang merupakan sjarat mutlak untuk mendjamin berlangsungnja pekerdjaan dilapangan perekonomian dan un-

PERPUSTAKAAN NASIONAL

tuk mempertahankan Negara kita terhadap segala antjaman dari luar maupun dari dalam dan untuk mempertahankan peraturan-peraturan dan Undang-undang Negara kita terhadap siapapun jang melanggarnja.

Maksud lain dari Pemerintah jang tidak kurang pentingnja, jaitu untuk memberikan bahan-bahan angka-angka jang njata jang nanti akan disampaikan oleh Kementerian Keuangan tentang keadaan keuangan Negara dan kemampuan kita pada masa jang akan datang membelandjai hasrat jang besar dari kita bersama, dipusat maupun didaerah, untuk melaksanakan objek-objek pembangunan.

Pemerintah mengharapkan dengan pengertian ini akan timbul pula keinsjafan, bahwa disamping tuntutan-tuntutan jang merupakan angka ratusan djuta, jang djika dikumpulkan meliputi puluhan miljard akan pula timbul realisme, bahwa disamping menuntut itu kita bersama harus memikirkan bagaimana tjaranja kita menjediakan biaja jang berdjumlah puluhan miljard itu.

Kenjataan sekarang ini menggambarkan tjara kita berpikir dan merentjana itu sering terbatas atas susunan daftar-daftar dari biaja-biaja untuk mengerdjakan jang kita ingin laksanakan, dengan tidak ambil pusing dari mana kita harus mendapatkan biaja sebesar itu, kurang diperhatikan pula nilai ekonomis dari sesuatu projek, misalnja: kita semuanja tentu ingin melihat djalan-djalan semuanja baik, lebar dan diaspal dengan djembatan-djembatan jang bagus-bagus.

Apakah semuanja ini sungguh-sungguh diharuskan atau dibutuhkan oleh banjaknja lalu-lintas jang melalui djalan itu?

Segala hal ini dengan tidak mengurangi kenjataan bahwa memang beberapa djalan itu sungguh-sungguh perlu diperbaiki, akan tetapi tidak sedjauh semuanja djalan-djalan itu didjadikan autostrada.

Hasrat mendirikan gedung-gedung jang besar dan mewah, misalnja rumah sakit, tempat-tempat pendidikan, dalam keadaan keuangan Negara seperti sekarang itu kadang-kadang sedikit mendekati sifat „luxury".

Dengan uang jang sama Pemerintah mendapat kesan, kita bisa membikin dua rumah sakit jang agak sederhana tetapi mentjukupi segala sjarat-sjarat tehnis dan hygienis, dari uang jang dipergunakan untuk satu rumah sakit jang bagus itu.

PERPUSTAKAAN NASIONAL

Saja pernah melihat complex pendidikan jang memang penting artinja, jang gedungnja hanja bersifat sementara tapi tjukup bagus dan sebentar lagi akan diganti dengan gedung jang permanent, sedang sebetulnja complex jang bersifat sementara itu dapat dipergunakan buat waktu sedikit-dikitnja 10 tahun dengan pemeliharaan semestinja, dengan tidak mengurangi effisiensi dalam pendidikan itu.

Seringkali Pemerintah dihadapkan dengan tuntutan-tuntutan untuk menurunkan bea ini, bea itu, sedangkan penghasilan itu sebetulnja dapat dipergunakan untuk menambah tenaga kita untuk memperbesar pembangunan.

Disamping itu terdapat pula tjara bekerdja kita diberbagai Kementerian dan Djawatan jang amat lambat dan dengan demikian merugikan pekerdjaan dalam lapangan pembangunan, misalnja dalam lapangan administrasi jang sungguh-sungguh harus diichtiarkan diperbaikinja.

Maka dari itu dalam atjara telah ditjantumkan pula persoalan administrasi pemerintahan dipusat dan daerah, agar lebih mendjamin lantjarnja pelaksanaan segala pekerdjaan.

Dengan tidak setjara mendalam membahas berbagai persoalan pada rapat-rapat jang akan datang ingin Pemerintah meminta perhatian terhadap beberapa soal jang amat penting jang tertjantum dalam atjara Musjawarah ini.

Jang amat mengchawatirkan dilihat dari sudut perkembangan ekonomi dan dari sudut tjita-tjita kita untuk memperbaiki tingkat penghidupan rakjat, jaitu tjepat bertambahnja setiap tahun penduduk bangsa kita dibandingkan dengan kemadjuan produksi nasional.

Menurut garis-garis besar Rentjana Pembangunan Lima Tahun jang merupakan lampiran dari rantjangan Undang-undang tentang Rentjana Pembangunan Lima Tahun djumlah penduduk Indonesia dalam tahun 1950 dihitung 76,5 djuta, pada tahun 1955 mendjadi 82,5 djuta, tahun 1958 didasarkan atas bertambahnja penduduk 1½% tiap tahun akan mendjadi 86 djuta, didasarkan atas bertambahnja penduduk 2½% tiap tahun 87,5 djuta, sehingga rata-rata dengan tambahan 1,7%, jang dipergunakan sebagai dasar perhitungan selandjutnja oleh Biro Perantjang Negara, penduduk pada tahun 1960 akan berdjumlah 90 djuta.

Setiap Pemerintah, sekarang dan selandjutnja dan Pemerintah manapun djuga, entah Pemerintah jang berkaki tiga, berkaki empat atau

PERPUSTAKAAN NASIONAL

berkaki lima, akan dihadapkan pada persoalan bertambahnja penduduk setiap tahun, ditahun-tahun jang akan datang, antara 1½ sampai 2 djuta.

Pada waktu sekarang ini menurut Kementerian Perburuhan dan Biro Perantjang Negara pengangguran berdjumlah 2 djuta, sedang „setengah" pengangguran berdjumlah 5 djuta, sedang bersandarkan atas bertambahnja penduduk antara 1½ sampai 2 djuta tiap tahun itu, pengangguran setiap tahun bertambah dengan sedikitnja ½ djuta, sehingga pada achir tahun 1958 pengangguran akan bertambah 2½ djuta ditambah dengan separo dari 5 djuta itu.

Hal ini akan menimbulkan persoalan jang amat berat jaitu soal pemberian makanan, pakaian dan lapangan penghidupan buat pemuda-pemuda kita jang sekarang sudah mulai menghadapi kesulitan dalam mendapatkan lapangan pekerdjaan.

Soal inilah sebetulnja jang mengharuskan Pemerintah dan tiap Pemerintah untuk berichtiar dengan sekuat tenaga untuk membuka lapangan-lapangan baru, untuk menambah produksi dengan segala ichtiar jang dapat kita lakukan dalam rangka kebidjaksanaan pembangunan.

Oleh karena inilah kita harus berani mengambil keputusan-keputusan dan tindakan-tindakan, misalnja dalam lapangan pembukaan bermatjam-matjam pertambangan melalui perusahaan nasional, perusahaan tjampuran nasional dengan asing atau perusahaan asing dengan sjarat-sjarat jang tertentu, mengenai tjorak perusahaan, pembagian saham, batas waktu dan lain-lain hal.

Menurut anggapan Pemerintah tidak dapat lebih lama kita menunggu-nunggu sampai lengkapnja perundang-undangan kita, sedang generasi muda sudah menunggu-nunggu diperluasnja lapangan untuk penghidupan mereka.

Pertanjaan lain jang penting, hal mana pula tertjantum dalam atjara Musjawarah ini, jaitu sampai manakah akan diberikan kesempatan berusaha untuk pengusaha-pengusaha partikelir dalam rangka kebidjaksanaan perekonomian kita; sampai mana batas-batas jang dikehendaki kita dalam penjelenggaraan perusahaan-perusahaan Pemerintah didasarkan atas dalil-dalil sosialistis.

PERPUSTAKAAN NASIONAL

Selandjutnja perlu pula ditentukan sikap jang tegas jang dapat diterima oleh forum jang luas ini tentang problim asli dan tidak asli dalam berbagai lapangan perusahaan.

Segala persoalan ini dapat disimpulkan sebagai policy ekonomi nasional terpimpin ataupun liberal.

Ingin sekali Pemerintah dalam hal ini mendapatkan perumusan jang tegas dari forum Musjawarah Nasional Pembangunan ini.

Soal lain jang sekarang sudah mulai timbul sebagai persoalan dalam rangka hubungan pusat dengan daerah jaitu sampai sedjauh mana sesuatu daerah mempunjai hak penuh atas kekajaan-kekajaan jang terdapat didaerah itu.

Setjara konkrit misalnja: apakah hasil minjak tanah, hasil pertambangan logam-logam jang penting, misalnja besi, aliminium, nikkel, batubara sebagai bahan pembakar jang penting, adalah hak sepenuhnja daerah dimana bahan itu terdapatnja.

Pemerintah sendiri berpendapat bahwa harus ada ketegasan, jang diterima oleh kita sekalian, bahwa ada kekajaan-kekajaan alam jang tertentu dan penting untuk kehidupan Negara kita sebagai kesatuan, jang harus merupakan kekajaan nasional dan bukan kekajaan sesuatu daerah, misalnja minjak, logam jang penting, bahan radio-aktif, tenaga listrik besar-besaran, oleh karena pengaruhnja djauh melampaui batas-batas sesuatu daerah dan exploitasi bahan tersebut menentukan kuat-lemahnja ekonomi negara kita seluruhnja.

Dapat dalam hal ini perlu ditjarikan modus agar supaja daerah jang bersangkutan dapat diberikan saham jang njata atas kekajaan ini.

Alangkah akan mendjadi katjaunja rentjana Pembangunan Negara dan alangkah akan terlambatnja dan ruginja Negara dan Bangsa seluruhnja djika misalnja daerah Riau menutup bauxietnja untuk kebutuhan daerah itu sadja, djika tenaga listrik jang dapat dipergunakan didaerah Asahan hanja terbatas untuk daerah itu sadja, djika bidji nikkel di Sulawesi dianggap hanja merupakan kekajaan Sulawesi Tengah sadja.

Disamping itu Pemerintah mengadjukan saran atau andjuran untuk mendapatkan penindjauan jang seksama oleh Musjawarah, jaitu sampai mana Musjawarah dapat mengikuti pendapat Pemerintah

PERPUSTAKAAN NASIONAL

bahwa pada masa pembangunan berentjana ini, harus lebih menitikberatkan ichtiar menambah pendidikan itu dalam lapangan keahlian dan chusus lapangan tehnis, jang disesuaikan atas kebutuhan untuk melaksanakan rentjana Pembangunan itu.

Selandjutnja Pemerintah berpendapat bahwa kita harus sungguh-sungguh mentjari djalan-djalan jang baru, misalnja dalam lapangan penambahan produksi bahan makanan, dimana Pemerintah akan berichtiar untuk melaksanakan projek-projek pertanian istimewa setjara units untuk chusus menambah hasil beras dengan tjara-tjara jang lebih tehnis dan mechanis, dipisahkan dari soal-soal ichtiar menambah produksi beras dengan melalui djalan transmigrasi jang kenjataan dalam prakteknja penambahan itu dengan djalan ini tidak mentjapai hasil jang diharapkan.

Disamping itu tjara-tjara baru jang menjimpang dari tjara-tjara jang konvensionil dalam pembikinan dan perbaikan djalan, perbaikan atau pembikinan projek-projek baru irigasi.

Kita harus setjara sungguh-sungguh berichtiar untuk mengikutsertakan rakjat banjak dalam pekerdjaan sematjam ini, jang harus dipilih sedemikian rupa hingga tidak melampaui batas tenaga dan ketjakapan tehnis dari golongan rakjat jang bersangkutan.

Dalam hal ini penting sekali kita mempergunakan tjara-tjara pembangunan masjarakat desa, (community development), jang bersifat gotong-rojong setjara lebih intensif, lebih berentjana dan lebih terpimpin, dengan tidak meninggalkan tjara-tjara demokratis dan tidak mempergunakan tjara-tjara paksaan.

Dari angka-angka jang nanti akan disadjikan oleh Kementerian Keuangan akan ternjata dimana letaknja batas-batas kemampuan Negara untuk menjediakan biaja buat investasi-investasi baru.

Kita harus bersama menginsjafi bahwa pertambahan investasi ini hanja dapat diselenggarakan dengan menambah produksi, djika perlu dengan mengurangkan konsumpsi dan selandjutnja dengan ichtiar mendapatkan bantuan dan pindjaman dari luar.

Alangkah baiknja djika kita menginsjafi bahwa soal pindjaman dari luar itu amat terbatas, bukan sadja oleh kepertjajaan dari luar kepada kita jang terutama didasarkan atas keadaan dan perkembangan politis dan ekonomis dari Negara kita, akan tetapi pula oleh kemampuan kita

PERPUSTAKAAN NASIONAL

untuk membajar kembali hutang ini jang harus dibajar dari kelebihan produksi kita.

Djika kita terus-menerus berhutang sedang produksi tetap terbelakang soal pindjaman ini akan mendjerumuskan kita kedjurang kebangkrutan.

Diharapkan pula tertjapainja pengertian tentang Ibukota misalnja, bahwa itu merupakan hal jang penting, akan tetapi apakah kita akan mulai sekarang djuga mengeluarkan biaja jang bermiljard-miljard banjaknja untuk keperluan itu ataukah kita lebih mendahulukan pendirian misalnja pabrik besi, sebagai langkah permulaan kedjurusan industri berat, jang biasanja mendjadi tulang-punggung dari kekuatan sesuatu Negara.

Pengertian bahwa djika kita menuruti tjara bekerdja sendiri-sendiri didaerah akan melemahkan ichtiar kita untuk membangun Negara dalam keseluruhannja dalam lapangan industri.

Sekali lagi disamping mentjari djalan-djalan baru kita harus terus-menerus berichtiar mentjari bottlenecks dalam tjara-tjara kerdja jang konvensionil dilakukan.

Sekarang ini kita harus bersedia tjepat merubah tjara bekerdja, walaupun dalam hal ini perlu pula diketahui bahwa berbagai hal itu harus diselenggarakan dengan tjara-tjara jang teratur dengan Undang-undang, Peraturan Pemerintah atau dengan peraturan-peraturan lain jang sedikit banjak memerlukan waktu untuk menjiapkannja dan untuk melaksanakannja.

Telah sering dinjatakan di Dewan Perwakilan Rakjat dan diluar Dewan itu oleh Pemerintah jang lalu dan Pemerintah sekarang, bagaimana pentingnja kita setjepat mungkin harus mempunjai rentjana djangka pandjang jang bersifat overall, jang bisa berdjalan continue dengan tidak dirubah-rubah oleh Kabinet-kabinet jang berganti-ganti.

Pemerintah mengharapkan supaja Musjawarah Nasional Pembangunan ini akan mendapatkan hasil-hasil jang konkrit jang dapat dipergunakan sebagai:

a. dasar untuk rentjana pembangunan overall djangka pandjang,

b. bahan untuk melakukan kebidjaksanaan perekonomian Pemerintah sambil menunggu lengkapnja perundang-undangan atau peraturan-peraturan Negara kita, putusan-putusan jang tegas dan

PERPUSTAKAAN NASIONAL

dapat dimengerti dan ditaati oleh setiap peserta Musjawarah Nasional Pembangunan ini dipusat, daerah, oleh golongan-golongan partikelir, golongan-golongan fungsionil jang ada hubungannja dengan lapangan pembangunan.

Hadlirin jang terhormat,

Pemerintah bermaksud mengusulkan kepada Musjawarah Nasional Pembangunan jang terhormat ini agar supaja Pimpinan Musjawarah ini dapat kita bersama serahkan kepada kedua tokoh Nasional Soekarno-Hatta, jang telah rakjat Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 pertjajakan menjatakan proklamasi kemerdekaan kita.

Demikian sekarang pula Pemerintah mengandjurkan supaja sekali lagi dalam menghadapi persoalan-persoalan jang penting buat penghidupan dan kehidupan Bangsa Indonesia dan untuk mengisi kemerdekaan kita, kita serahkan pimpinan kepada kedua tokoh ini.

Setjara formil juridis Pemerintah nanti akan menerima pekerdjaan Musjawarah ini sebagai usul pada Pemerintah, untuk selandjutnja — sebagai hasil kebidjaksanaannja — dipertanggung-djawabkan pada Dewan Perwakilan Rakjat.

Pemerintah jakin bahwa sudah tjukup pengertian antara Dwi-tunggal Soekarno-Hatta dan Pemerintah, bahwa tidak akan timbulnja perbedaan faham jang prinsipiil; pula oleh karena Pemerintah akan terus-menerus mengikuti Musjawarah ini dapat kiranja terdjamin bahwa hasil pekerdjaannja akan dapat diterima dan dioper oleh Pemerintah sebagai kebidjaksanaan dan pendirian Pemerintah.

Dengan ini saja sebagai wakil Pemerintah Republik Indonesia menjatakan setjara resmi Musjawarah Nasional Pembangunan dimulai dan selandjutnja sebagai atjara pertama saja mengusulkan penundjukan pimpinan Musjawarah selandjutnja.

Sekian. Terima kasih.

PERPUSTAKAAN NASIONAL

PERPUSTAKAAN NASIONAL

PERPUSTAKAAN NASIONAL

PERPUSTAKAAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

R . 3

PERTJETAKAN NEGARA — DJAKARTA — 223/B-'57